



KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

APBN KITA

KINERJA DAN FAKTA

**Kinerja APBN Terjaga di Tengah
Risiko Global yang Dinamis**

MEI | 2024

Foto:
Storypost - Juan H. Girsang

Scan dan Unduh
APBN KITA




ISSN link
APBN KiTa



Terima kasih pembaca. Sampaikan kritik
dan saran Anda untuk meningkatkan kualitas
publikasi APBN KiTa dengan scan barcode di
bawah ini:



A portrait of Sri Mulyani Indrawati, a woman with short dark hair, wearing glasses and a dark patterned blouse with a large brooch. She is smiling and has her hands clasped on a white surface. The background is a plain, light blue wall.

**“APBN KiTa tetap
tangguh sebagai
shock absorber dan
masih menunjukkan
kinerja positif.”**

Sri Mulyani Indrawati

Diterbitkan oleh: Kementerian Keuangan Republik Indonesia. **Pelindung:** Menteri Keuangan dan Wakil Menteri Keuangan. **Pengarah:** Pimpinan Unit Eselon I Kemenkeu **Penanggung Jawab:** Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko selaku Sekretaris Komite *Asset-Liability Committee* Kementerian Keuangan. **Pemimpin Redaksi:** Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi, Direktur Strategi dan Portofolio Pembiayaan, Kepala Pusat Kebijakan Ekonomi Makro. **Dewan Redaksi:** Tim Deputies *Asset-Liability Committee* Kementerian Keuangan. **Tim Redaksi:** Tim Teknis *Asset-Liability Committee* Kementerian Keuangan, Tim Redaksi Penyusun Publikasi APBN KiTa. **Editor:** Tim Editor Penyusun Publikasi APBN KiTa **Desain Grafis, Layout dan Foto:** Biro KLI Kementerian Keuangan. Alamat Redaksi: Gedung Frans Seda Lantai 8, Jl. Dr. Wahidin Raya No. 1, Jakarta.



Daftar Isi

RINGKASAN EKSEKUTIF	9
PERKEMBANGAN EKONOMI MAKRO	17
POSTUR APBN	21
Penerimaan Perpajakan	25
Penerimaan Kepabeanan & Cukai	31
Penerimaan Negara Bukan Pajak	37
Belanja Pemerintah Pusat	43
Transfer ke Daerah	49
Pembiayaan Utang	55
<i>Calendar Events 2024</i>	60
Pojok Literasi	62
Buletin Info Risiko Fiskal Edisi III-2023	
Podcast Mengetahui Lebih Dekat Penerimaan Negara Bukan Pajak	
Laporan Khusus	64

Glossarium

- Alutsista** : Alat Utama Sistem
Persenjataan
- Almatsus** : Alat Material Khusus
- AP** : *Administered Price*
- APBN** : Anggaran dan Pendapatan
dan Belanja Negara
- AS** : Amerika Serikat
- ASEAN** : *The Association of
Southeast Asian Nations*
- ASN** : Aparatur Sipil Negara
- Bansos** : Bantuan Sosial
- Bapanas** : Badan Pangan Nasional
- BBM** : Bahan Bakar Minyak
- BI** : Bank Indonesia
- BK** : Bea Keluar
- BLT** : Bantuan Langsung Tunai
- BLU** : Badan Layanan Umum
- BM** : Bea Masuk
- BMN** : Barang Milik Negara
- BPJS** : Badan Penyelenggaraan
Jaminan Sosial
- BPS** : Badan Pusat Statistik
- bps** : basis points
- BUK** : Bank Umum Konvensional
- BUS** : Bank Umum Syariah
- BUMN** : Badan Usaha Milik Negara
- CAR** : *Capital Adequacy Ratio*
- CDS** : *Credit Default Swap*
- CHT** : Cukai Hasil Tembakau





IPM	:	Indeks Pembangunan Manusia
ICP	:	Indonesia <i>Crude Price</i>
JKN	:	Jaminan Kesehatan Nasional
K/L	:	Kementerian/Lembaga
KI	:	Kredit Investasi
KIP	:	Kartu Indonesia Pintar
KI	:	Kredit Konsumsi
KKB	:	Kredit Kendaraan Bermotor
KLCI	:	Kuala Lumpur Composite Indeks
KMK	:	Kredit Modal Kerja
KND	:	Kekayaan Negara Dipisahkan
KPM	:	Keluarga Penerima Manfaat
KPR	:	Kredit Pemilikan Rumah
KUR	:	Kredit Usaha Rakyat
LMAN	:	Lembaga Manajemen Aset Negara
LNPR	:	Lembaga Nonprofit yang Melayani Rumah Tangga
LPG	:	<i>Liquefied Petroleum Gas</i>
MBR	:	Masyarakat Berpenghasilan Rendah
Migas	:	Minyak dan Gas Bumi
mtm	:	<i>Month to Month</i>
MTN	:	<i>Medium Term Note</i>
NDA	:	<i>Net Domestic Asset</i>
NFA	:	<i>Net Foreign Asset</i>
NFB	:	<i>Net Foreign Buy</i>
NIM	:	<i>Net Interest Margin</i>
NPI	:	Neraca Pembayaran Indonesia
NPL	:	<i>Non-performing Loan</i>



Dalam Triliun Rupiah

Ringkasan Eksekutif

Hingga akhir April 2024, realisasi Pendapatan Negara dan Hibah tercatat Rp924,92 triliun atau telah mencapai 33,04 persen dari target pada APBN 2024¹.

Capaian tersebut turun Rp75,72 triliun atau pertumbuhannya terkontraksi 7,57 persen (yoy). Secara nominal, realisasi komponen Pendapatan Negara yang bersumber dari penerimaan Perpajakan mencapai Rp719,91 triliun, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) mencapai Rp203,33 triliun, dan realisasi Hibah mencapai Rp1,68 triliun. Berdasarkan pertumbuhannya, realisasi penerimaan Perpajakan dan PNBP masing-masing terkontraksi 8,02 persen (yoy) dan 6,69 persen (yoy). Sementara capaian masing-masing komponen Pendapatan Negara tersebut terhadap target berturut-



Kinerja perpajakan menurun, terdampak oleh peningkatan restitusi dan penurunan pembayaran PPh Badan pada sektor industri pengolahan dan pertambangan batubara.

1. Persentase terhadap target dan pagu mengacu pada APBN 2024

turut 31,21 persen dan 41,33 persen.

Realisasi penerimaan Perpajakan bersumber dari penerimaan Pajak serta Kepabeanan dan Cukai. Hingga akhir April 2024 capaian penerimaan Pajak tercatat Rp624,19 triliun dan Kepabeanan dan Cukai Rp95,72 triliun.

Kinerja penerimaan Perpajakan tersebut berkontraksi, hal tersebut juga terlihat pada kinerja pertumbuhan komponen penerimaan Pajak yang berkontraksi 9,29 persen (yoy), sementara penerimaan Kepabeanan dan Cukai hingga April 2024 tumbuh 1,29 persen (yoy). Realisasi penerimaan Pajak serta Kepabeanan dan Cukai tersebut masing-masing mencapai 31,38 persen dan 29,82 persen terhadap target. Kinerja perpajakan ini masih dipengaruhi oleh faktor volatilitas harga komoditas dengan kecenderungan menurun, dampak peningkatan restitusi dan penurunan pembayaran PPh Badan pada sektor industri pengolahan dan pertambangan batubara.

Penerimaan Pajak terutama berasal dari penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) Nonmigas Rp377,00 triliun dan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPN/PPnBM) Rp218,50 triliun. Kontribusi kedua komponen penerimaan Pajak tersebut terhadap total penerimaan Pajak masing-masing 60,40 persen dan 35,01 persen. Secara lebih detail, PPh Nonmigas berdasarkan nominal penerimaannya masih ditopang oleh tiga komponen terbesarnya yang bersumber dari PPh Pasal 25/29 Badan, PPh Pasal 21, dan PPh Final, yang kontribusi ketiganya mencapai 74,13 persen terhadap total penerimaan PPh Nonmigas. Berdasarkan pertumbuhannya, PPh Nonmigas hingga akhir April 2024 ini berkontraksi 8,25 persen (yoy). Meskipun PPh Nonmigas berkontraksi, namun kinerja dua komponen utamanya yaitu

PPh Pasal 21 dan PPh Final berturut-turut tumbuh 41,39 persen (yoy) dan 15,10 persen (yoy). Sedangkan pertumbuhan PPh Badan tercatat berkontraksi cukup dalam 35,54 persen (yoy), yang menjadi faktor utama penurunan PPh Nonmigas. Pertumbuhan komponen penerimaan PPh Pasal 21 dipengaruhi oleh utilisasi tenaga kerja dan faktor pembayaran THR di April 2024. Kinerja PPh Final juga masih tumbuh, didukung oleh peningkatan penerimaan dari tabungan atau deposito, sedangkan kinerja PPh Badan menurun disebabkan oleh peningkatan faktor restitusi dan setoran dari WP sektor pertambangan batubara yang menurun akibat moderasi harga komoditas di 2023. Hingga akhir April 2024, kinerja PPh Nonmigas juga didukung oleh pertumbuhan kinerja komponen PPh yang lainnya seperti PPh OP, PPh Pasal 26, PPh Pasal 23, dan PPh Pasal 22.

Lebih lanjut, realisasi penerimaan Pajak dari komponen penerimaan PPN/PPnBM terutama ditopang oleh penerimaan PPN, khususnya PPN Dalam Negeri (PPN DN) dan PPN Impor. Kontribusi dari kedua komponen tersebut masing-masing 58,17 persen dan 37,36 persen terhadap total penerimaan PPN/PPnBM. Secara kumulatif PPN/PPnBM berkontraksi 8,95 persen (yoy), meskipun secara bruto kinerjanya masih tumbuh positif. Secara lebih detail, hingga April 2024 PPN DN berkontraksi 13,89 persen (yoy), sementara kinerja PPN Impor tumbuh 0,31 persen (yoy). Kinerja PPN DN terutama dipengaruhi oleh peningkatan restitusi dari sektor industri pengolahan dan pertambangan, meskipun restitusi tersebut menurun dibandingkan periode yang sama bulan sebelumnya. Kinerja positif PPN Impor dipengaruhi oleh kinerja sektor perdagangan terutama



Peningkatan Indonesia Crude Price (ICP) salah satunya terjadi akibat dari penurunan stok minyak mentah di AS serta serangan Ukraina pada kilang-kilang Rusia yang berpengaruh pada pasokan BBM di wilayah Asia dan Eropa yang berpotensi menimbulkan pengetatan di pasar minyak.

komoditas BBM dan tepung terigu.

Capaian realisasi penerimaan Kepabeanan dan Cukai terdiri atas penerimaan Cukai Rp74,20 triliun, Bea Masuk (BM) Rp15,74 triliun, dan Bea Keluar (BK) Rp5,78 triliun. Penerimaan Kepabeanan dan Cukai terutama didukung oleh penerimaan dari Cukai, khususnya Cukai Hasil Tembakau (CHT) dengan kontribusi mencapai 74,52 persen terhadap total penerimaan Kepabeanan dan Cukai. Hingga akhir April 2024, kinerja komponen penerimaan Kepabeanan dan Cukai tumbuh 1,29 persen (yoy), khususnya pada penerimaan BK, tumbuh cukup signifikan 40,63 persen (yoy). Namun, penerimaan Cukai dan

BM masih berkontraksi masing-masing 0,50 persen (yoy). Kinerja penerimaan Cukai HT terutama masih dipengaruhi oleh penurunan produksi dan tarif efektif di November-Desember 2023. Sementara itu, kinerja BM juga dipengaruhi oleh penurunan tarif efektif dari komoditas impor utama seperti kendaraan roda 4, suku cadang kendaraan, serta gas alam dan buatan. Di sisi lain, kinerja BK meningkat didorong oleh faktor kebijakan relaksasi ekspor komoditas tembaga yang berkontribusi 79,5 persen terhadap total penerimaan BK, meskipun BK produk sawit menurun akibat harga dan volume yang menurun (yoy).

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)

Realisasi PNBP sampai dengan akhir April 2024 mencapai Rp203,32 triliun (41,33 persen terhadap target) atau tumbuh 6,69 persen (yoy). Perlambatan penerimaan PNBP disebabkan oleh moderasi harga komoditas utama serta penurunan *lifting* minyak dan gas bumi. Meskipun terdapat peningkatan signifikan pada PNBP KND, akan tetapi PNBP SDA dan PNBP Lainnya mengalami perlambatan.

Secara lebih rinci, **realisasi Pendapatan SDA mencapai Rp75,84 triliun atau turun 22,98 persen (yoy).** Pertumbuhan negatif terjadi pada SDA Migas maupun Nonmigas. **Perlambatan kinerja SDA Migas 10,37 persen (yoy)** disebabkan oleh kenaikan ICP di antaranya akibat penurunan stok minyak mentah di AS serta serangan Ukraina pada kilang-kilang Rusia yang berpengaruh pada pasokan BBM di wilayah Asia dan Eropa, berpotensi menimbulkan pengetatan di pasar minyak. Penurunan *lifting* minyak bumi disebabkan oleh penurunan tingkat alamiah sumur migas yang tinggi, sejalan dengan fasilitas produksi

migas utama yang telah menua.

Perlambatan kinerja PNBP SDA Nonmigas 31,94 persen (yoy) terutama dipengaruhi oleh moderasi harga beberapa komoditas utama Indonesia, seperti harga batubara acuan (HBA) yang turun signifikan USD162,2 atau 57,39 persen (yoy). Begitu pula harga dengan komoditas mineral lainnya seperti Kobalt, Timbal, Seng, Aluminium, dan tembaga juga turun. Di sisi lain kenaikan PNBP pada sektor kehutanan 44,00 persen disebabkan oleh peningkatan jumlah produksi kayu bulat 613.971 m³. Lebih lanjut peningkatan tajam pada PNBP sektor Kelautan dan Perikanan 1.473,1 persen disebabkan oleh peningkatan volume produksi kapal perikanan dengan izin pusat yang mencapai 345,32 ribu ton pada Januari s.d 30 April 2024, dibandingkan dengan periode yang sama 2023 yang

hanya 15,80 ribu ton, dengan komoditas utama Cakalang, Cumi-cumi, dan Madidhang. Selanjutnya peningkatan PNBP pada sektor Panas Bumi mencapai 70,6 persen (yoy) dikarenakan oleh peningkatan Setoran Bagian Pemerintah (SBP) 49,75 persen yang terjadi pada Maret 2024. Selanjutnya peningkatan PNBP pada sektor Panas Bumi mencapai 70,6 persen (yoy) dikarenakan oleh peningkatan Setoran Bagian Pemerintah (SBP) 49,75 persen yang terjadi pada Maret 2024 dari anak perusahaan milik pemerintah yang bergerak di bidang energi. **Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari KND tercatat tumbuh 21,43 persen (yoy) dengan capaian Rp49,59 triliun (57,77 persen dari target).** Peningkatan PNBP KND terutama berasal dari pembayaran dividen Perbankan Tahun Buku (TB) 2023 yang mencapai 99,99 persen dari total realisasi. Dividen perbankan untuk TB 2023 mencapai Rp49,6 triliun atau meningkat 21,4 persen (yoy).



Realisasi Subsidi BBM dan Subsidi LPG Tabung 3 kg menurun karena penurunan konsumsi BBM oleh masyarakat dan program konversi penggunaan gas sebagai pengganti minyak tanah secara bertahap khususnya di daerah yang belum terkonversi.

Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari BLU tercatat naik Rp24,01 triliun atau 11,37 persen (yoy). Pertumbuhan kinerja PNBP BLU terutama disebabkan oleh peningkatan pendapatan BLU Nonsawit, antara lain : (i) Jasa Pelayanan Rumah Sakit meningkat 51,59 persen (yoy), (ii) Jasa Pelayanan Pendidikan meningkat 22,69 persen (yoy), (iii) Jasa Pengelolaan Kawasan Otorita tumbuh 202,64 persen (yoy). Sementara itu realisasi pendapatan BLU Sawit sampai akhir April 2024 mencapai Rp6,60 triliun, turun 22,33 persen (yoy) karena penurunan harga referensi CPO yang ditetapkan oleh Kementerian Perdagangan pada April 2024 yang tercatat 4,5 persen (yoy) atau menjadi USD857,62/MT

Sementara itu, hingga akhir April 2024 realisasi PNBP Lainnya mencapai Rp53,87 triliun atau terkontraksi 5,52 persen (yoy). Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh penurunan PNBP PHT (produksi hasil tambang) 36,24 persen (yoy) akibat moderasi HBA USD57,6/ton atau 70,17 persen (yoy). Sedangkan pendapatan PNBP Kementerian/Lembaga (K/L) meningkat 8,07 persen (yoy) terutama berasal dari pendapatan nonlayanan berupa denda dari Kementerian ESDM (mayoritas berasal dari denda dana kompensasi batubara). Di samping itu, terdapat pendapatan layanan yang tumbuh positif antara lain pendapatan jasa transportasi pada Kementerian Perhubungan, pendapatan jasa layanan administrasi hukum pada Kemenkumham, serta pendapatan jasa tenaga, pekerjaan, dan informasi pada Kemen ESDM.

Belanja Negara

Realisasi Belanja Negara sampai dengan akhir April 2024 mencapai Rp849,25 triliun (25,54 persen dari pagu). Realisasi tersebut meliputi Belanja Pemerintah Pusat yang mencapai Rp591,73 triliun dan Transfer ke Daerah Rp257,51 triliun. Realisasi Belanja Pemerintah Pusat tumbuh 13,21 persen (yoy) terutama dipengaruhi oleh capaian Belanja Pegawai 34,75 persen (yoy) terutama untuk pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) ASN/TNI/POLRI aktif dan Pensiunan. Kinerja realisasi Belanja Barang hingga akhir April 2024 mencapai Rp109,90 triliun terutama untuk mendukung persiapan, pelaksanaan dan pengawasan Pemilu 2024.

Subsidi

Realisasi Belanja Subsidi sampai dengan akhir April 2024 mencapai Rp51,82 triliun (18,12 persen dari pagu) atau turun 16,47 persen (yoy). Realisasi



Transfer ke Daerah yang terdiri dari DAK Nonfisik, Hibah kepada Daerah, dan Insentif Fiskal menurun. Sementara itu, DAK Fisik belum mencatatkan realisasi karena pemerintah daerah masih berproses dalam memenuhi syarat penyaluran.

Belanja Subsidi tersebut meliputi Subsidi Energi Rp42,41 triliun, naik 0,62 persen (yoy) dan Subsidi Nonenergi Rp9,41 triliun, turun 52,69 persen (yoy).

Realisasi Belanja Subsidi Energi terutama bersumber dari subsidi BBM dan Subsidi LPG Tabung 3 Kg yang mencapai Rp24,96 triliun atau 22,04 persen dari pagu. Realisasi Subsidi BBM dan Subsidi LPG Tabung 3 Kg turun 7,08 persen (yoy) dengan realisasi Subsidi BBM Rp5,03 triliun yang dibagi atas Subsidi Minyak Tanah Rp1,08 triliun dan Subsidi Solar Rp3,95 triliun, kemudian subsidi dengan realisasi terbesar yakni Subsidi LPG Tabung 3 Kg dengan realisasi mencapai Rp19,93 triliun.

Berdasarkan pertumbuhannya sampai dengan akhir April 2024, subsidi BBM dan LPG Tabung 3 Kg menurun

meskipun rata-rata ICP justru naik 3,61 persen (yoy) atau USD2,80 per barel. Dari segi volume untuk LPG Tabung 3 Kg naik 0,02 Juta MT atau 1,01 persen (yoy), namun sebaliknya untuk volume konsumsi BBM justru menurun 0,11 juta kilo liter atau terkontraksi 2,51 persen (yoy). Penurunan realisasi tersebut dipengaruhi oleh penurunan konsumsi BBM oleh masyarakat sebagai dampak kebijakan pemerintah untuk terus mencapai subsidi solar yang lebih tepat sasaran serta upaya untuk terus melaksanakan program konversi menuju penggunaan gas sebagai pengganti minyak tanah secara bertahap khususnya di daerah yang belum terkonversi. Selain subsidi BBM dan LPG Tabung 3 Kg, dalam Subsidi Energi terdapat juga Subsidi Listrik dengan realisasi Rp17,45 triliun atau naik 14,14 persen (yoy). Peningkatan ini dipengaruhi oleh naiknya volume konsumsi listrik 1,34 TWh atau tumbuh sebesar 8,52 persen (yoy). Kenaikan realisasi Subsidi Listrik ini terutama dipengaruhi oleh peningkatan rata-rata ICP serta gencarnya upaya Perusahaan Listrik Negara (PLN) untuk terus meningkatkan konsumsi listrik melalui program elektrifikasi dan peningkatan jumlah pelanggan listrik khususnya golongan industri. Selain itu, peningkatan konsumsi listrik juga dipengaruhi oleh komitmen pemerintah untuk terus meningkatkan rasio elektrifikasi nasional.

Selanjutnya, realisasi Belanja Subsidi Nonenergi sampai dengan 30 April 2024 mencapai Rp9,41 triliun, atau turun 52,69 persen (yoy). Realisasi tersebut masih didominasi oleh Subsidi Kredit Program Rp7,02 triliun atau 74,58 persen dari total realisasi Subsidi Nonenergi. Sementara itu, realisasi lain dari Subsidi Nonenergi adalah subsidi Pajak Rp1,87 triliun atau 22,5 persen dari pagu. Subsidi *Public Service Obligation*

(PSO) sampai dengan akhir April 2024 mencapai Rp518,2 miliar, naik 0,39 persen (yoy). Penyaluran tahun berjalan jenis Subsidi Nonenergi Lainnya belum terdapat realisasi dikarenakan masih penyelesaian proses administrasi dan verifikasi dalam penyaluran subsidi.

Transfer ke Daerah

Realisasi Transfer ke Daerah (TKD) sampai dengan 30 April 2024 mencapai Rp257,52 triliun atau 30,03 persen dari pagu.

Dilihat dari pertumbuhannya, realisasi TKD lebih tinggi Rp14,44 triliun atau naik 5,94 persen (yoy). Secara umum, peningkatan realisasi TKD terutama disebabkan oleh realisasi Dana Alokasi Umum (DAU) Rp147,52 triliun, lebih tinggi Rp12,93 triliun atau naik 9,61 persen (yoy). Hal ini disebabkan oleh peningkatan pagu DAU *Blockgrant* dan kepatuhan pemda dalam memenuhi syarat salur. Realisasi jenis TKD lain yang meningkat di antaranya: 1) Dana Bagi Hasil (DBH) Rp40,57 triliun, lebih tinggi Rp4,80 triliun atau naik 13,41 persen (yoy); 2) Dana Otonomi Khusus (Otsus) Rp1,63 triliun, lebih tinggi Rp0,44 triliun atau naik 37,38 persen (yoy); 3) Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta Rp0,21 triliun, lebih tinggi Rp0,05 triliun atau naik 28,55 persen (yoy); dan 4) Dana Desa Rp25,77 triliun, lebih tinggi Rp5,25 triliun atau naik 25,59 persen (yoy).

Sementara itu, realisasi Jenis Transfer yang menurun yaitu Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik, Hibah kepada Daerah, dan Insentif Fiskal. Realisasi DAK Nonfisik Rp41,33 triliun, lebih rendah Rp7,95 triliun atau turun 16,13 persen (yoy). Realisasi Hibah ke Daerah tercatat Rp11,52 miliar. Realisasi Insentif Fiskal Rp0,48 triliun atau lebih rendah Rp0,04 triliun atau turun 7,88 persen (yoy). Sementara itu, DAK Fisik belum

mencatatkan realisasi karena pemerintah daerah masih berproses dalam memenuhi syarat penyaluran.

Pembiayaan Utang

Kinerja Pendapatan Negara yang lebih tinggi dibanding Belanja Negara pada periode ini menjaga Keseimbangan Primer dalam kondisi positif. Keseimbangan Primer per 30 April 2024 tercatat positif Rp237,10 triliun atau 1,04 persen PDB dan Surplus Anggaran Rp Rp75,68 triliun atau 0,33 persen PDB.

Realisasi Pembiayaan mencapai Rp71,06 triliun atau 13,59 persen terhadap pagu. Realisasi Pembiayaan tersebut didominasi oleh Pembiayaan Utang Rp119,09 triliun atau 18,38 persen terhadap pagu, yang terdiri atas realisasi Surat Berharga Negara (Neto) Rp128,59 triliun dan Pinjaman (Neto) negatif Rp9,50 triliun. Pinjaman (Neto) berasal dari Pinjaman Dalam Negeri (Neto) negatif Rp269,90 miliar dan Pinjaman Luar Negeri (Neto) negatif Rp9,23 triliun. Pemerintah melakukan Penarikan Pinjaman Luar Negeri (Bruto) Rp20,57 triliun dan Pembayaran Cicilan Pokok Pinjaman Luar Negeri negatif Rp29,80 triliun.

Sementara itu, realisasi Pembiayaan Investasi mencapai Rp49,48 triliun. Pemerintah juga memberikan Pinjaman Rp1,15 triliun dan merealisasikan anggaran untuk Pembiayaan Lainnya Rp304,40 miliar.

Posisi SILPA sampai dengan akhir April 2024 tercatat Rp146,74 triliun. Pembiayaan Investasi Rp21,61 triliun. Pemerintah juga memberikan Pinjaman Rp625,00 miliar dan merealisasikan anggaran untuk Pembiayaan Lainnya Rp296,00 miliar.

**Perekonomian
Nasional Masih Tetap
Kuat dan Stabilitas
Ekonomi Tetap
Terjaga**



Perkembangan Ekonomi Makro

Prospek perekonomian global diperkirakan masih dalam ketidakpastian dengan menghadapi risiko yang meningkat. Kondisi ekonomi Amerika Serikat masih menghadapi tekanan inflasi dan fiskal, di tengah situasi politik menjelang perhelatan Pemilu. Kondisi ini memicu ketidakpastian atas pelonggaran suku bunga the Fed yang memicu gejolak pasar keuangan global, terutama pada *emerging market*. Perkembangan harga komoditas, energi dan pangan cenderung masih fluktuatif. Perkembangan PMI manufaktur April 2024 untuk global memperlihatkan kinerja tertinggi dalam 10 bulan terakhir, tercatat 52,4. Kinerja ini terutama didorong oleh tingkat kepercayaan bisnis yang tetap tinggi di tengah gejolak geopolitik.



Di sisi lain, kondisi ketegangan geopolitik akhir-akhir ini akan mengakibatkan disrupsi rantai pasokan yang selanjutnya akan meningkatkan harga komoditas, terutama komoditas energi.

Perekonomian Indonesia kembali tumbuh kuat di tengah stagnasi ekonomi global dan gejolak pasar keuangan. Pada triwulan I 2024, ekonomi Indonesia tumbuh 5,1 persen (yoy), terutama ditopang oleh permintaan domestik yang kuat dan dukungan APBN. Sementara itu, aktivitas ekonomi di awal triwulan II 2024 menunjukkan perkembangan yang menguat. *Purchasing Managers' Index* Manufaktur tercatat 52,9, menandakan ekspansi sektor manufaktur selama 32 bulan berturut-turut. Indeks Kepercayaan Konsumen tetap berada pada level optimis yakni 123,8, mencerminkan ekspektasi positif konsumen terhadap kondisi ekonomi saat ini dan masa depan. Keseluruhan indikator ini menunjukkan bahwa penguatan ekonomi nasional terus berlangsung yang didukung terutama oleh konsumsi domestik dan aktivitas industri yang solid. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara juga akan terus mendukung pembangunan ekonomi, menjaga daya beli masyarakat, dan memberikan perlindungan sosial. Kinerja ekonomi yang solid mampu menurunkan tingkat pengangguran terbuka (TPT) menjadi 4,82 persen pada Februari 2024 dari sebelumnya 5,32 persen pada Februari 2023.

Tekanan terhadap stabilitas perkembangan pasar keuangan nasional Mei 2024 masih berlangsung namun tetap terkendali. Indeks Harga Saham Gabungan tercatat pada level 7.253,63 pada penutupan perdagangan 28 Mei 2024. Sementara itu, nilai tukar Rupiah terhadap Dolar AS dengan menggunakan rata-rata kurs tengah Bank Indonesia tercatat Rp16.064 per USD pada 28 Mei 2024. Rata-rata nilai tukar Rupiah hingga 28 Mei 2024 tercatat Rp15.805 per USD. Rupiah terdepresiasi dari posisi awal tahun 4,05 persen.

Dibandingkan dengan negara-negara sejenis di kawasan, seperti Malaysia, Vietnam, Thailand, dan lainnya, tekanan terhadap Rupiah masih relatif terkendali. Inflasi April 2024 tercatat 3,00 persen (yoy), turun tipis dari inflasi Maret 2024, 3,05 persen (yoy). Penurunan inflasi ini sejalan dengan harga pangan yang melandai di tengah masa Idul Fitri. Inflasi April tercatat 0,25 persen (mtm), lebih rendah dibandingkan inflasi mtm pada tiga tahun sebelumnya. Posisi cadangan devisa nasional Indonesia per akhir April 2024 tercatat USD136,2 miliar, menurun dibandingkan Maret yang disebabkan oleh pembayaran utang luar negeri pemerintah dan upaya stabilisasi nilai tukar Rupiah.

Jumlah wisatawan mancanegara (wisman) yang berkunjung ke Indonesia hingga Maret 2024 tetap tinggi. Kunjungan wisman di Indonesia mencapai 1,04 juta kunjungan pada Maret 2024. Wisman yang berkunjung ke Indonesia pada Maret 2024 didominasi oleh wisman yang berasal dari Malaysia (15,38 persen), Australia (11,92 persen), dan Singapura (11,52 persen). Secara kumulatif, kunjungan wisman pada Januari hingga Maret 2024 tercatat 3,03 juta atau meningkat 25,43 persen (yoy). Perkembangan aktivitas pariwisata nasional akan terus meningkat dan secara langsung akan berdampak positif terhadap perkembangan sektor ekonomi terkait lainnya. Sektor yang terkait dengan aktivitas pariwisata secara langsung adalah sektor makanan dan akomodasi, hotel, transportasi, serta perdagangan. Sementara itu, kondisi Tingkat Penghunian Kamar (TPK) hotel klasifikasi bintang di Indonesia pada Maret 2024 mencapai 43,41 persen, menurun 2,85 poin (yoy).

Halaman Ini Dikosongkan

Sampai dengan
30 April 2024,
APBN Mencatatkan
Realisasi Pendapatan
Negara Rp924,92
Triliun atau 33,01
Persen dari Target



Postur APBN

Sampai dengan 30 April 2024, APBN mencatatkan realisasi Pendapatan Negara Rp924,92 triliun atau 33,01 persen dari target, terkontraksi 7,57 persen (yoy). Realisasi tersebut terdiri atas:

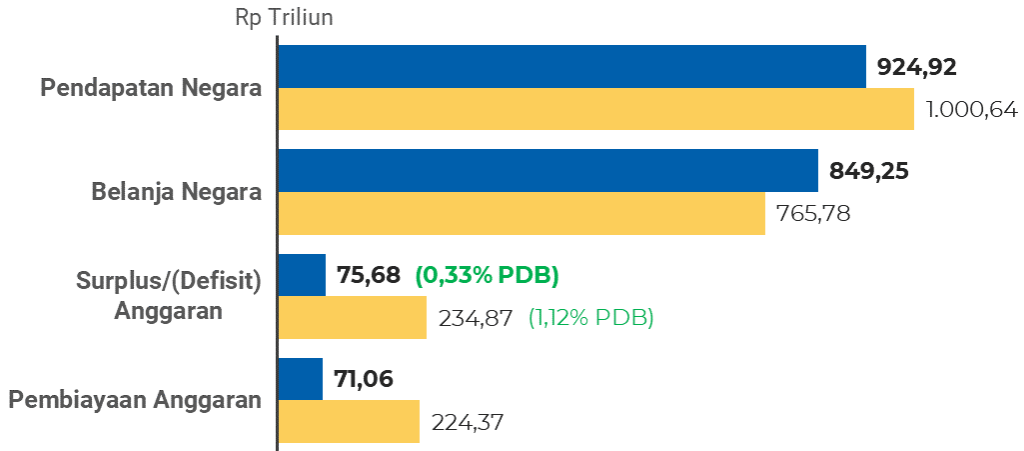
- Penerimaan Perpajakan mencapai Rp719,91 triliun atau 31,17 persen dari target, terkontraksi 8,02 persen (yoy). Penurunan penerimaan perpajakan tersebut dipengaruhi oleh penurunan Penerimaan Pajak 9,29 persen (yoy), dengan realisasi mencapai Rp624,19 triliun (31,38 persen dari target). Sementara itu, Penerimaan Kepabeanan dan Cukai Rp95,72 triliun (29,82 persen dari target), meningkat 1,29 persen (yoy).
- Penerimaan Negara Bukan Pajak mencapai Rp203,33 triliun atau 41,33 persen dari target,



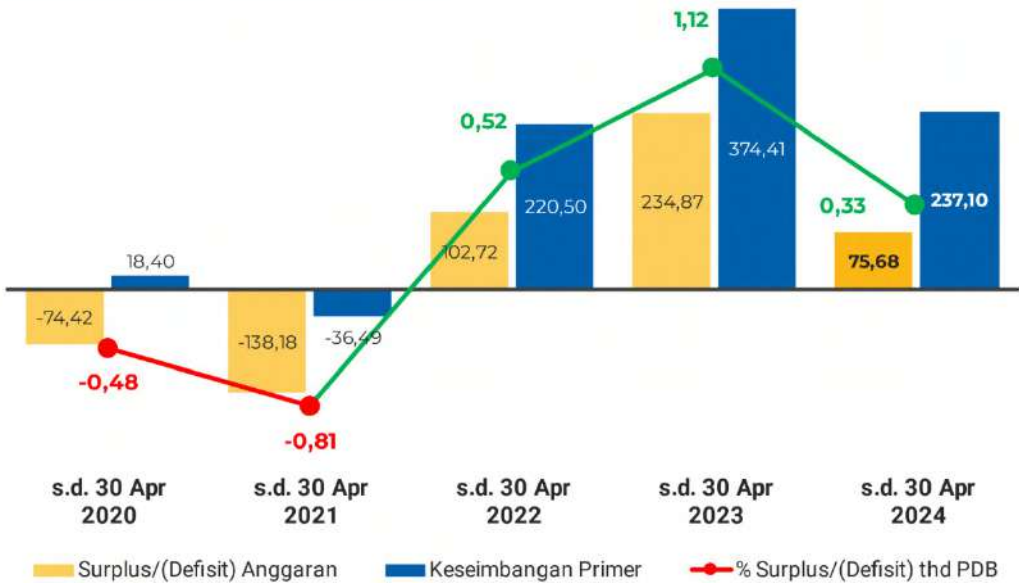
Sementara itu, realisasi pembiayaan anggaran telah mencapai Rp83,97 triliun (16,06 persen dari target).

Realisasi APBN s.d. April 2023 - 2024

■ 2024 ■ 2023



Perkembangan Surplus/Defisit dan Keseimbangan Primer



terkontraksi 6,69 persen (yoy)

- Penerimaan Hibah mencapai Rp1,68 triliun, meningkat signifikan dibandingkan realisasi pada periode yang sama tahun 2023 yang mencapai Rp0,09 triliun.

Di sisi Belanja Negara, sampai dengan 30 April 2024 terealisasi Rp849,25 triliun atau 25,54 persen dari pagu. Realisasi tersebut terdiri atas:

- Belanja Pemerintah Pusat mencapai Rp491,73 triliun atau 23,98 persen dari pagu. Realisasi tersebut terdiri atas realisasi Belanja K/L Rp304,17 triliun (27,88 persen dari pagu) dan realisasi Belanja nonK/L Rp287,56 triliun (20,89 persen dari pagu).

- Transfer ke Daerah mencapai Rp257,52 triliun atau 30,03 persen dari alokasi.

Berdasarkan realisasi Pendapatan dan Belanja Negara tersebut, sampai dengan 30 April 2024, APBN tercatat surplus Rp75,68 triliun atau 0,33 persen terhadap PDB (periode yang sama 2023, surplus mencapai Rp234,87 triliun atau 1,12 persen terhadap PDB). Keseimbangan primer juga tercatat surplus Rp237,10 triliun (periode yang sama 2023, surplus mencapai Rp374,41 triliun). Sementara itu, realisasi pembiayaan anggaran telah mencapai Rp71,06 triliun (13,59 persen dari target).

Realisasi Sementara APBN s.d. 30 April 2023 –2024

APBN (triliun rupiah)	2023			2024		
	Perpres 75/2023	Realisasi s.d. 30 April	% thd Perpres 75/2023	APBN	Realisasi s.d. 30 April	% thd APBN
A. Pendapatan Negara	2.637,25	1.000,64	37,94	2.802,29	924,92	33,01
I. Pendapatan Dalam Negeri	2.634,15	1.000,55	37,98	2.801,86	923,24	32,95
1. Penerimaan Perpajakan	2.118,35	782,65	36,95	2.309,86	719,91	31,17
a. Pajak	1.818,24	688,15	37,85	1.988,88	624,19	31,38
b. Kepabeanan dan Cukai	300,11	94,50	31,49	320,98	95,72	29,82
2. PNBPNP	515,80	217,90	42,24	492,00	203,33	41,33
II. Penerimaan Hibah	3,10	0,09	2,89	0,43	1,68	390,13
B. Belanja Negara	3.117,18	765,78	24,57	3.325,12	849,25	25,54
I. Belanja Pemerintah Pusat	2.302,46	522,70	22,70	2.467,53	591,73	23,98
1. Belanja K/L	1.000,84	257,70	25,75	1.090,83	304,17	27,88
2. Belanja Non K/L	1.301,61	265,00	20,36	1.376,70	287,56	20,89
II. Transfer Ke Daerah	814,72	243,08	29,84	857,59	257,52	30,03
C. Keseimbangan Primer	(38,53)	374,41	(971,81)	(25,51)	237,10	(929,61)
D. Surplus/(Defisit) Anggaran	(479,93)	234,87	(48,94)	(522,83)	75,68	(14,47)
% Surplus/(Defisit) thd PDB	(2,27)	1,12		(2,29)	0,33	
E. Pembiayaan Anggaran	479,93	224,37	46,75	522,83	71,06	13,59

Penerimaan Pajak Sektor Usaha April 2024 Dipengaruhi oleh Pembayaran PPh Badan Tahunan



Foto: Unsplash - Chintya Akemi

Penerimaan Pajak

Realisasi penerimaan pajak sampai dengan 30 April 2024 mencapai Rp624,19 triliun atau 31,38 persen dari target. Penerimaan pajak melambat akibat restitusi yang meningkat serta pembayaran PPh tahunan perusahaan yang menurun. Bila dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya, penerimaan pajak berkontraksi 9,29 persen (yoy). Penurunan tersebut terjadi pada kelompok PPh, PPN dan PPhnBM, serta PBB dan Pajak Lainnya.

Secara lebih rinci, PPh Nonmigas terealisasi Rp377,00 triliun atau 35,45 persen dari target. Perlambatan kinerja Pajak Penghasilan Nonmigas disebabkan oleh penurunan realisasi PPh Badan tahunan yang cukup signifikan. Hal ini dipengaruhi oleh harga komoditas



Penerimaan pajak melambat akibat restitusi yang meningkat serta pembayaran PPh tahunan perusahaan yang menurun.

Realisasi Penerimaan Pajak s. d. 30 April 2024

Uraian	1 Januari s.d. 30 April 2024					
	Target APBN 2024 (Triliun)	Realisasi Neto (Triliun)	Kontribusi (%)	Capaian (%)	Growth Neto (% yoy)	Growth Bruto (% yoy)
Pajak Penghasilan	1139,78	401,82	64,37	35,25	-9,35	-6,70
- Non Migas	1063,41	377,00	60,40	35,45	-8,25	-5,43
- Migas	76,37	24,81	3,98	32,49	-23,24	-23,24
PPN & PPnBM	811,36	218,50	35,01	26,93	-8,95	5,93
PBB dan Pajak Lainnya	37,73	3,87	0,62	10,27	-21,28	-22,59
Jumlah	1988,88	624,19	100,00	31,38	-9,29	-1,91

pada 2023 yang melemah sehingga menurunkan profitabilitas perusahaan. Meskipun pajak penghasilan atas korporasi tengah mengalami tekanan, jenis pajak penghasilan lainnya terjaga tumbuh positif seperti PPh Pasal 21, PPh Pasal 26, dan PPh Final.

Kemudian, PPN dan PPnBM membukukan capaian Rp218,50 triliun atau 26,93 persen dari target. Kinerja penerimaan April 2024 yang tumbuh positif menopang kinerja kumulatif PPN dan PPnBM. Meskipun masih berada dalam zona pertumbuhan negatif, laju pertumbuhan baik neto maupun bruto sampai dengan 30 April 2024 jauh lebih baik dibandingkan dengan triwulan I 2024. Kondisi tersebut disebabkan oleh perbaikan kinerja PPN Dalam Negeri dan PPN Impor.

Terakhir, realisasi penerimaan PPh Migas mencapai 32,49 persen dari target, sedangkan realisasi PBB dan Pajak Lainnya mencapai 10,27 persen dari target. Kedua kelompok pajak tersebut berkontraksi cukup dalam. PPh Migas berkontraksi akibat penurunan *lifting* minyak dan gas bumi, sementara itu PBB dan Pajak Lainnya berkontraksi akibat pembayaran tagihan pajak yang tidak berulang pada 2024.

Kinerja Jenis Pajak Utama

Pada April 2024, mayoritas jenis pajak utama mengalami pertumbuhan

baik atas penerimaan kumulatif maupun penerimaan bulanan. PPh Pasal 21, PPh Pasal 26, PPh Final, dan PPh Orang Pribadi tercatat tumbuh *double digits*. Selain itu, PPN Impor dan PPh Pasal 22 Impor juga mencatatkan pertumbuhan capaian yang lebih baik daripada periode sebelumnya.

Secara lebih detil, sampai dengan 30 April 2024 realisasi penerimaan PPh Pasal 21 mencapai Rp97,97 triliun atau tumbuh 41,39 persen (yoy). Pertumbuhan impresif tersebut disebabkan oleh capaian April 2024 yang tinggi akibat pembayaran THR. Apabila dibandingkan dengan April 2023, pertumbuhan capaian April 2024 menyentuh angka 81,38 persen (yoy).

Selanjutnya, realisasi PPh Pasal 26 mencapai Rp30,94 triliun atau tumbuh 15,78 persen (yoy). Kinerja PPh Pasal 26 didukung oleh peningkatan pembayaran dividen dari sektor keuangan yang mendongkrak capaian pada April 2024. Kemudian, PPh Final terealisasi Rp43,50 triliun, tumbuh 15,10 persen (yoy). Kinerja PPh Final ditopang oleh peningkatan pembayaran pajak penghasilan atas bunga deposito/tabungan dan jasa konstruksi.

Pajak Penghasilan Orang Pribadi membukukan capaian Rp9,23 triliun, tumbuh 10,50 persen (yoy). Kinerja April 2024 didorong oleh peningkatan setoran pajak penghasilan tahunan yang lewat waktu. Setoran pajak penghasilan tahunan seharusnya dilakukan sebelum



Kontribusi Sektor Industri Pengolahan mencapai 26,0 persen terhadap penerimaan pajak, sedangkan Sektor pertambangan mencapai 5,9 persen.

batas waktu pelaporan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi, tetapi pada April 2024 masih terdapat penerimaan atas setoran pajak tersebut. Di samping itu, kinerja PPh Orang Pribadi juga didukung oleh peningkatan setoran masa.

Selanjutnya, realisasi PPN Impor mencapai Rp81,63 triliun dan PPh Pasal 22 Impor mencapai Rp24,77 triliun. Jenis pajak tersebut sempat mengalami tekanan yang cukup dalam pada penerimaan Maret 2024 sehingga PPh Pasal 22 Impor tumbuh terbatas dan PPN Impor berkontraksi pada triwulan I 2024. Namun, penerimaan April 2024 kembali meningkat sehingga pertumbuhan kumulatif PPh Pasal 22 Impor sampai dengan 30 April 2024 tercatat 2,76 persen (yoy) dan PPN Impor tercatat 0,31 persen (yoy). Dari sisi sektoral, kedua jenis pajak tersebut ditopang oleh penerimaan pajak sektor perdagangan bahan bakar minyak dan gas bumi serta industri tepung terigu.

Sebaliknya, dua kontributor terbesar penerimaan pajak, yakni PPh Badan dan PPN Dalam Negeri berkontraksi. Realisasi penerimaan PPh Badan mencapai 22,11 persen dan PPN Dalam Negeri mencapai 20,36 persen

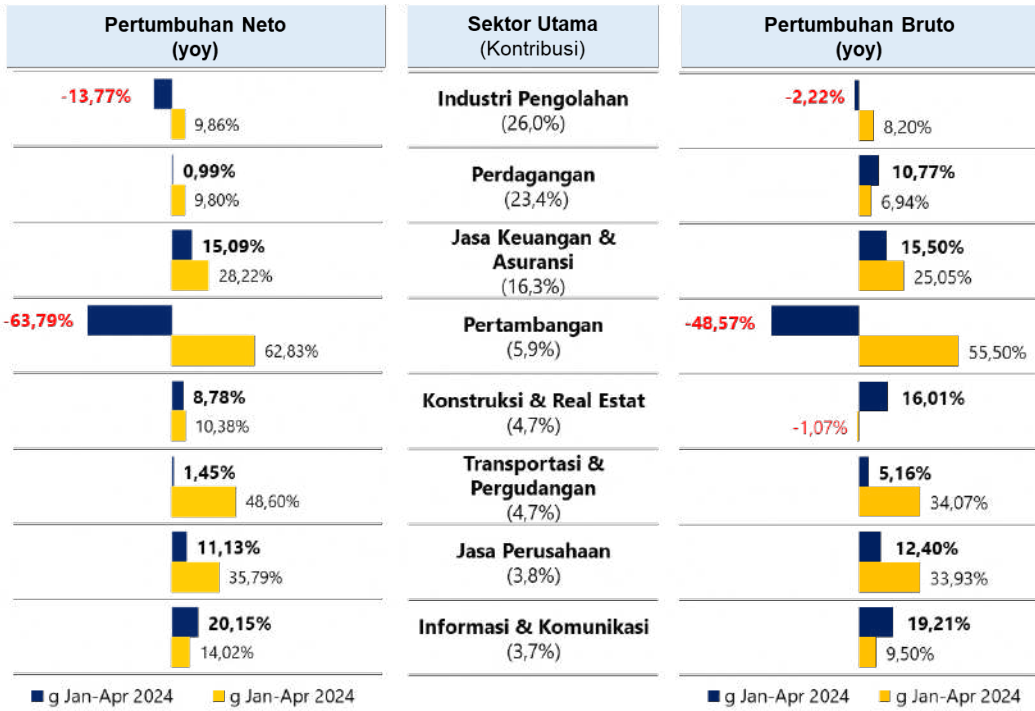
terhadap total penerimaan pajak. Selama empat bulan pertama di 2024, kinerja PPh Badan belum menunjukkan perbaikan. Hal ini disebabkan oleh pembayaran PPh Badan tahunan yang berkurang, terutama setoran dari sektor pertambangan yang mengalami penurunan laba akibat moderasi harga komoditas. Sementara itu, kontraksi PPN Dalam Negeri terutama akibat peningkatan restitusi. Namun, PPN Dalam Negeri mengalami pertumbuhan positif atas penerimaan April 2024 setelah tiga bulan berturut-turut berkontraksi. Kinerja yang baik dari sektor perdagangan yang mencerminkan terjaganya konsumsi masyarakat turut mendorong kinerja PPN Dalam Negeri pada April 2024.

Kinerja Sektor Utama

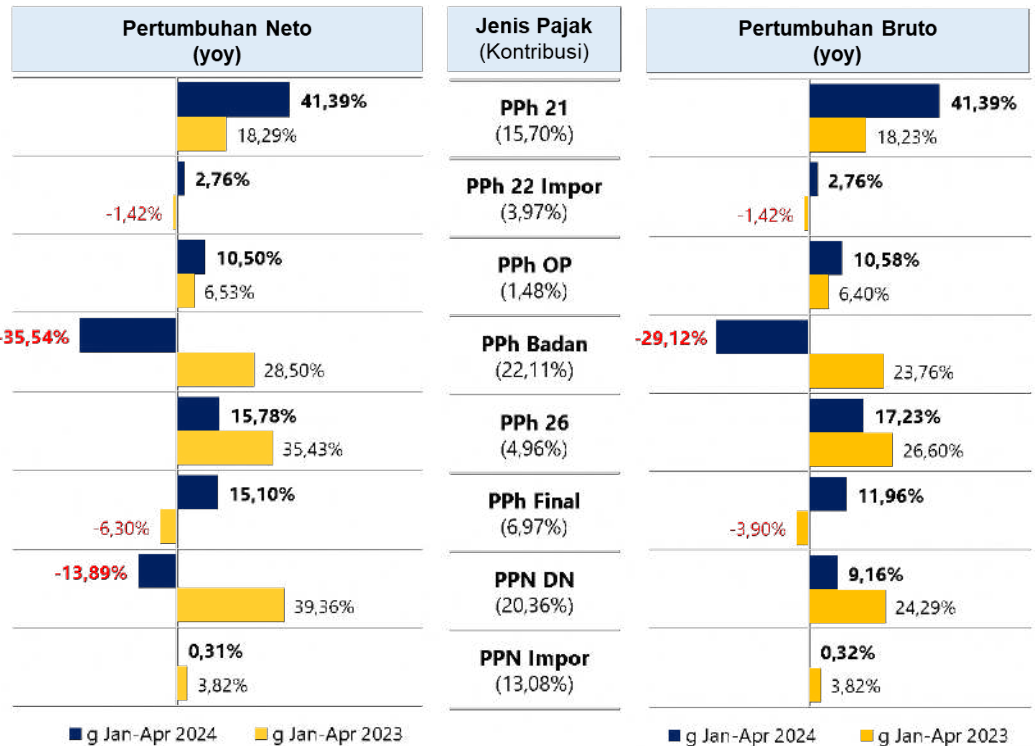
Dari sisi penerimaan sektoral, mayoritas sektor utama penerimaan pajak mencatatkan peningkatan capaian pada periode sampai dengan 30 April 2024. Bahkan, Sektor Perdagangan yang pada triwulan I berkontraksi telah memasuki zona positif pertumbuhan penerimaan pajak untuk periode Januari - April 2024. Hanya Sektor Industri Pengolahan dan Sektor Pertambangan yang masih berkontraksi. Secara umum, kinerja sektor utama April 2024 dipengaruhi oleh pembayaran PPh Badan tahunan.

Kontribusi Sektor Industri Pengolahan mencapai 26,0 persen terhadap penerimaan pajak, sedangkan Sektor Pertambangan mencapai 5,9 persen. Kinerja kumulatif maupun bulanan, kedua sektor tersebut melambat. Pada April 2024, Sektor Industri Pengolahan berkontraksi yang disebabkan oleh pembayaran PPh Badan tahunan dari industri minyak kelapa sawit dan pupuk. Sementara, Sektor Pertambangan berkontraksi karena penurunan pembayaran PPh Badan tahunan dari pertambangan batubara akibat

Penerimaan Pajak Sektoral



Penerimaan Jenis-Jenis Pajak Utama



moderasi harga 2023 dan perubahan status izin usaha pertambangan.

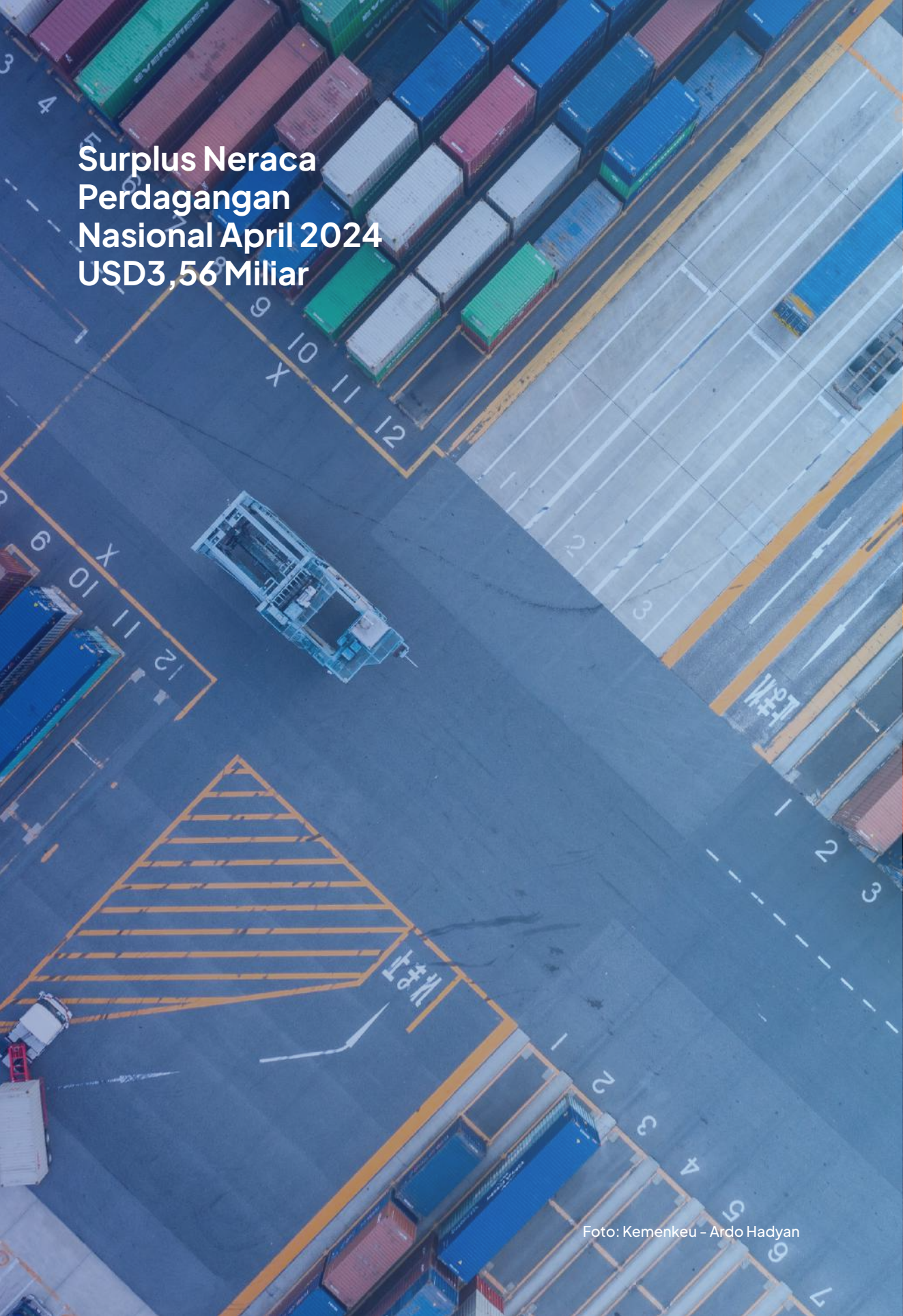
Di antara sektor-sektor utama, Sektor Informasi dan Komunikasi, Sektor Jasa Keuangan dan Asuransi, serta Sektor Jasa Perusahaan mencatatkan pertumbuhan hingga *double digits*. Ketiga sektor tersebut mencatatkan pertumbuhan kumulatif masing-masing 20,15 persen (yoy), 15,09 persen (yoy), dan 11,13 persen (yoy). Sektor Jasa Keuangan dan Asuransi yang berperan 16,3 persen terhadap penerimaan pajak tumbuh konsisten sejalan dengan pertumbuhan tabungan dan penyaluran kredit perbankan. Sementara, Sektor Informasi dan Komunikasi yang berperan 3,7 persen serta Sektor Jasa Perusahaan yang berperan 3,8 persen terhadap penerimaan pajak, tumbuh selaras dengan peningkatan konsumsi masyarakat.

Sektor Perdagangan merupakan sektor terbesar kedua penyumbang penerimaan pajak pada periode ini. Pertumbuhan positif dialami baik oleh perdagangan besar maupun perdagangan eceran. Di tengah tekanan restitusi yang meningkat, Sektor Perdagangan mampu tumbuh tipis 0,99 persen (yoy) akibat peningkatan realisasi jenis pajak atas konsumsi.

Kemudian, Sektor Konstruksi dan *Real Estate* yang berperan terhadap 4,7 persen terhadap penerimaan pajak, tumbuh 8,78 persen (yoy). Capaian kinerja ini ditopang oleh PPh Badan tahunan kawasan industri dan pariwisata. Terakhir, Sektor Transportasi dan Pergudangan juga membukukan pertumbuhan penerimaan yang positif pada periode Januari - April 2024. Kinerja positif Sektor Transportasi dan Pergudangan sejalan dengan aktivitas masyarakat yang meningkat.



Sektor Jasa Keuangan dan Asuransi yang berperan 16,3 persen terhadap penerimaan pajak tumbuh konsisten sejalan dengan pertumbuhan tabungan dan penyaluran kredit perbankan.

An aerial photograph of a port terminal. The foreground is dominated by a large, dark asphalt area with yellow and white markings, including a large yellow triangle and various numbers (1-12) and letters (X). In the middle ground, a large blue and white ship is docked at a pier. The background is filled with rows of colorful shipping containers in shades of blue, red, green, and white. The overall scene is a busy port area.

**Surplus Neraca
Perdagangan
Nasional April 2024
USD3,56 Miliar**

Foto: Kemenkeu - Ardo Hadyan

Penerimaan Kepabeanaan & Cukai

Kinerja neraca perdagangan April 2024 masih menunjukkan kinerja positif, surplus USD3,56 miliar.

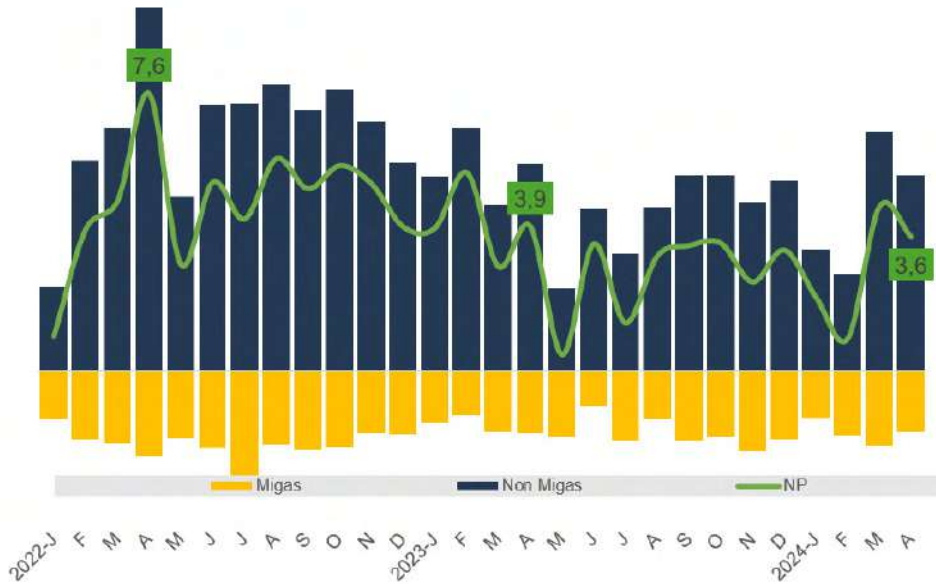
Kinerja ini berdampak positif pada cadangan devisa dan meneruskan rentetan surplus sejak Mei 2020. Jadi, secara keseluruhan, hingga April 2024 Neraca Perdagangan Indonesia mencatatkan surplus USD10,97 miliar. Hal tersebut merupakan capaian yang menggembirakan untuk perekonomian Indonesia.

Surplus neraca terutama terjadi pada Nonmigas sedangkan Migas masih defisit. Kinerja positif neraca Nonmigas didukung oleh komoditas SDA seperti batubara dan minyak goreng kelapa sawit. Selain itu, sektor manufaktur terutama logam dasar seperti besi, baja dan bijih tembaga juga memberikan



**Secara keseluruhan,
hingga April 2024
Neraca Perdagangan
Indonesia mencatatkan
surplus USD10,97 miliar.**

Grafik Neraca Perdagangan Indonesia
2022-2024 (dalam USD miliar)



Realisasi Penerimaan Kepabeanaan
dan Cukai (dalam triliun Rupiah)

No.	Jenis Penerimaan	Target APBN	Realisasi		Growth (y-o-y, %)		% Capaian
			2023	2024	2023	2024	
1	BEA MASUK	57,37	15,82	15,74	3,32%	-0,50%	27,43%
2	CUKAI	246,08	74,58	74,20	-5,07%	-0,50%	30,15%
	Hasil Tembakau	230,41	72,35	71,72	-5,16%	-0,88%	31,13%
	Ethil Alkohol	0,10	0,04	0,04	-20,34%	21,12%	41,53%
	MMEA	9,33	2,16	2,38	-1,36%	10,55%	25,55%
	Denda Adm. Cukai	-	0,02	0,05	-18,15%	129,23%	-
	Cukai Lainnya	-	0,01	0,01	-22,30%	20,48%	-
	Plastik	1,85	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
	MBDK	4,39	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
3	BEA KELUAR	17,53	4,11	5,78	-71,69%	40,63%	32,95%
TOTAL		320,98	94,50	95,72	-12,81%	1,29%	29,82%
	PPN Impor		81,38	81,64	3,82%	0,32%	
	PPNBM Impor		1,72	1,84	30,79%	6,74%	
	PPh Pasal 22 Impor		24,10	24,77	-1,42%	2,76%	
	Total PDRI lainnya		107,20	108,24	2,93%	0,97%	
TOTAL DJBC + PERPAJAKAN			201,70	203,96	-5,10%	1,12%	

Sumber: DJPB 6 Mei 2024



Ekspor berhasil kembali tumbuh setelah sepuluh bulan berturut-turut menurun sebagai dampak moderasi harga.

kontribusi penting dalam menciptakan surplus tersebut. Di sisi lain neraca Migas masih defisit, terutama disebabkan oleh impor bahan bakar dan minyak bumi.

Pada April 2024, ekspor mencapai USD19,62 miliar, tumbuh 1,72 persen (yoy), didorong oleh kinerja positif sektor Nonmigas maupun Migas. Ekspor berhasil kembali tumbuh setelah sepuluh bulan berturut-turut menurun sebagai dampak moderasi harga. Kinerja sektor Nonmigas meningkat 1,33 persen (yoy) dengan kontribusi pertumbuhan terbesar dari ekspor logam dasar dan perhiasan. Kemudian ekspor sektor Migas naik 7,25 persen (yoy), dipengaruhi oleh peningkatan ekspor gas alam ke Jepang dan Korea Selatan serta Minyak Bakar ke Malaysia.

Sementara itu, impor mencapai USD16,06 miliar atau tumbuh 4,62 persen (yoy), dipengaruhi kinerja positif sektor Nonmigas maupun Migas. Nonmigas tumbuh 5,68 persen (yoy) terutama dari impor peralatan komunikasi, komponen elektronik, bahan baku plastik dan kendaraan roda

empat. Selanjutnya, impor Migas juga tumbuh 0,18 persen (yoy) didorong oleh komoditas utama, misalnya bensin, minyak bumi, dan gas alam

REALISASI PENERIMAAN KEPABEANAN DAN CUKAI

Hingga 30 April 2024, realisasi Penerimaan Kepabeanan dan Cukai mencapai Rp95,72 triliun atau 29,82 persen dari target. Penerimaan total tumbuh 1,29 persen (yoy), terutama dari penerimaan Bea Keluar (BK) yang masih tumbuh signifikan, sedangkan Cukai dan Bea Masuk (BM) masih turun.

Realisasi Penerimaan PDRI lainnya mencapai Rp108,24 triliun atau naik 0,97 persen (yoy). Dengan demikian, Penerimaan Negara yang telah dikumpulkan dari Kepabeanan dan Cukai serta PDRI lainnya mencapai Rp203,96 triliun atau naik 1,12 persen (yoy).

Dari sisi BM, kinerja penerimaan turun 0,50 persen (yoy) menjadi Rp15,74 triliun atau mencapai 27,43 persen dari target. Kinerja BM dipengaruhi oleh penurunan penerimaan dari komoditas utama di antaranya kendaraan roda empat serta suku cadangnya dan gas alam maupun buatan. Selain itu, penerimaan BM juga turut dipengaruhi oleh tren penurunan tarif sebagai dampak perluasan perjanjian perdagangan bebas dengan negara-negara mitra.

Penerimaan BK mencapai Rp5,78 triliun, 32,95 persen dari target atau tumbuh signifikan 40,63 persen (yoy). Peningkatan tersebut terutama berasal dari BK Mineral, sedangkan penerimaan dari CPO masih menurun. BK Mineral tumbuh signifikan mencapai lebih



Sigaret Kretek Mesin (SKM) dan Sigaret Putih Mesin (SPM) golongan 1, yang memiliki tarif tinggi, turun lebih dalam sehingga berdampak pada tarif yang rendah.

dari enam kali lipat, dipengaruhi oleh relaksasi ekspor tembakau. Sedangkan penerimaan BK produk sawit turun 68,28 persen (yoy) dipengaruhi oleh penurunan volume ekspor dan moderasi harga.

Cukai merupakan mesin utama Penerimaan Kepabeanan dan Cukai, dengan penerimaan mencapai Rp74,20 triliun atau 30,15 persen dari target. Kinerja tersebut berkontraksi 0,50 persen (yoy) dipengaruhi oleh penurunan Cukai Hasil Tembakau (CHT) sedangkan penerimaan dari Ethil Alkohol (EA) dan Minuman Yang Mengandung Ethil Alkohol (MMEA) masih tumbuh.

Penerimaan CHT berkontraksi 0,88 persen (yoy) menjadi Rp71,72 triliun atau tercapai 31,13 persen dari target. Penurunan tersebut dipengaruhi oleh basis produksi HT pada November dan Desember 2023 dan pelunasan maju. Pada periode tersebut baik produksi dan tarif efektif menurun. Penurunan produksi Sigaret Kretek Mesin (SKM) dan Sigaret Putih Mesin (SPM) golongan

1, yang memiliki tarif tinggi, turun lebih dalam sehingga berdampak pada tarif yang rendah. Sedangkan Pelunasan maju terjadi karena penerimaan yang jatuh tempo pada hari libur 1 Januari 2024 sehingga harus dilunasi maju pada Desember 2023.

Penerimaan Cukai MMEA naik 10,55 persen (yoy) menjadi Rp2,38 triliun, mencapai 25,55 persen dari target. Kenaikan tersebut didorong oleh kebijakan kenaikan tarif MMEA dan peningkatan produksi 2,14 persen (yoy) terutama dari Golongan A Dalam Negeri. MMEA Golongan A merupakan kelompok minuman beralkohol dengan kadar paling rendah sampai dengan 5 persen dan memiliki porsi produksi terbesar dibanding golongan lainnya.

Sementara itu, kinerja Penerimaan Cukai EA naik 21,12 persen (yoy) menjadi Rp43,31 miliar, atau 41,53 persen dari target. Peningkatan kinerja tersebut dikarenakan peningkatan produksi EA bayar 21,12 persen. Namun demikian perlu diketahui bahwa sebagian besar EA yang diproduksi, mencapai 96,66 persen tidak dipungut cukainya atau dibebaskan untuk keperluan medis, industri atau fasilitas lainnya.

Halaman Ini Dikosongkan

**Dividen Perbankan
dan Layanan PNBP
Kementerian/Lembaga
Tumbuh Positif
Mendorong PNBP**



Foto: Storypost - Ahmad Z. Fariza

Penerimaan Negara Bukan Pajak

Moderasi harga komoditas di pasaran hingga akhir April 2024 masih berlanjut. Pelemahan realisasi *lifting* minyak dan gas bumi serta HBA batubara menjadi faktor dominan yang semakin menekan capaian PNBPN periode Januari sampai dengan April 2024. Realisasi PNBPN tercatat Rp203,33 triliun, 41,33 persen dari target, terkontraksi 6,69 persen (yoy). Pendapatan KND dan BLU menjadi kontributor utama yang mendorong pertumbuhan positif PNBPN hingga April 2024 masing-masing sebesar 21,43 persen (yoy) dan 11,37 persen (yoy). Di samping itu, Pendapatan dari Layanan PNBPN K/L juga menunjukkan kenaikan kinerja yang



**Pendapatan KND
menjadi kontributor
utama yang mendorong
pertumbuhan positif
PNBPN hingga April
2024 tercatat 21,43
persen (yoy).**

Realisasi PNBP sampai dengan 30 April 2024

PNBP (Miliar Rupiah)	APBN 2024	Realisasi (Rp Triliun)		Growth (yoy)		Capaian (%)	
		2023	2024	2023	2024	2023	2024
Penerimaan Negara Bukan Pajak	492.003,76	217.899,46	203.329,38	22,88%	-6,69%	49,37%	41,33%
A Pendapatan SDA	207.669,95	98.478,03	75.848,76	32,39%	-22,98%	50,25%	36,52%
1 Migas	110.154,56	40.906,20	36.663,77	-17,25%	-10,37%	31,19%	33,28%
2 Nonmigas	97.515,39	57.571,83	39.184,99	130,73%	-31,94%	88,84%	40,18%
a Pendapatan Pertambangan Minerba	85.840,00	55.906,39	36.454,12	146,35%	-34,79%	103,47%	42,47%
b Pendapatan Kehutanan	6.000,00	1.388,89	2.003,30	-8,54%	44,24%	26,91%	33,39%
c Pendapatan Perikanan	3.500,00	18,24	286,89	-96,10%	1473,13%	0,52%	8,20%
d Pendapatan Panas Bumi	2.175,39	258,32	440,69	-4,67%	70,60%	12,22%	20,26%
B Pendapatan KND	85.845,47	40.840,00	49.593,17	62,71%	21,43%	83,18%	57,77%
C Pendapatan PNBP Lainnya	115.135,98	57.017,67	53.872,56	-1,02%	-5,52%	50,32%	46,79%
1 Pendapatan Penjualan Hasil Tambang	27.700,00	17.480,31	11.144,72	14,95%	-36,24%	56,01%	40,23%
2 Pendapatan Minyak Mentah (DMO)	6.830,87	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
3 Pendapatan PNBP K/L	80.605,11	39.537,36	42.727,83	-6,75%	8,07%	51,49%	53,01%
D Pendapatan BLU	83.352,38	21.563,77	24.014,89	6,59%	11,37%	25,98%	28,81%
a BLU Kepala Sawit	27.850,19	8.504,26	6.604,97	-5,99%	-22,33%	24,70%	23,72%
b BLU Non Kepala Sawit	55.502,18	13.059,51	17.409,92	16,76%	33,31%	26,88%	31,37%

signifikan sebesar 8,07 persen (yoy).

Pendapatan SDA mencapai Rp75,85 triliun, 36,52 persen dari target. Realisasi Pendapatan SDA Migas melemah dibandingkan periode yang sama 2023. Pelemahan ini terutama disebabkan berkurangnya lifting minyak dan gas bumi, serta pelemahan Harga Batubara Acuan (HBA). Lifting minyak bumi mengalami pengurangan disebabkan tingkat penurunan alamiah sumur migas yang tinggi sejalan dengan fasilitas produksi migas utama yang telah menua. Pada periode Desember 2023 sampai dengan Maret 2024, lifting minyak bumi turun 6,06 persen (yoy) dan lifting gas bumi turun 4,94 persen (yoy).

Realisasi Pendapatan SDA Nonmigas mencapai Rp39,18 triliun, 40,18 persen dari target. Realisasi ini melambat dibandingkan periode yang sama tahun 2023. Perlambatan kinerja tersebut terutama disumbang penurunan penerimaan sektor Pertambangan Minerba. Adapun sektor Kehutanan, sektor Perikanan, dan sektor Panas Bumi menunjukkan kinerja positif dan signifikan dibandingkan periode yang sama

tahun 2023. Bahkan sektor Perikanan tercatat tumbuh 1.473,13 persen (yoy).

Pendapatan sektor Minerba mencapai Rp36,45 triliun, 42,47 persen dari target. Realisasi ini menurun dibandingkan periode yang sama tahun 2023. Faktor penurunan HBA dan beberapa Harga Mineral Acuan (HMA) di pasaran menyumbang pengurangan pendapatan sektor Minerba. Rata-rata HBA bulan Januari sampai dengan April 2024 berkontraksi 70,17 persen (yoy), harga tembaga berkontraksi 3,65 persen (yoy), harga nikel berkontraksi 38,93 persen (yoy), dan harga timah berkontraksi 3,24 persen (yoy). Penurunan harga tersebut berdampak pada berkurangnya pendapatan dari royalti batubara dan mineral.

Pendapatan sektor Kehutanan mencapai Rp2,00 triliun, 33,39 persen dari target. Capaian ini meningkat dibandingkan periode Januari sampai dengan April 2023 disebabkan oleh peningkatan jumlah produksi kayu bulat sebanyak 613.971 m³, dari 42.461.669 m³ pada periode Januari sampai dengan April 2023 menjadi 43.075.640m³ pada periode yang sama 2024.



**Kenaikan pendapatan
PNBP K/L yang tumbuh
8,07 persen (yoy)
adalah buah dari sinergi
kerja keras jajaran
K/L dan partisipasi
aktif masyarakat.**

Sementara itu, realisasi sektor Perikanan Rp286,89 miliar, mencapai 8,20 persen dari target. Kinerja sektor Perikanan tumbuh 1.473,13 persen (yoy) sebagai dampak meningkatnya pembayaran Pendapatan Pungutan Hasil Perikanan (PHP) yang sudah menggunakan mekanisme Pascaproduksi. Peningkatan tajam ini disebabkan adanya peningkatan volume produksi kapal perikanan dengan izin pusat di mana pada periode Januari sampai dengan April 2024 mencapai 345,32 ribu ton lebih besar dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2023 yang hanya sebesar 15,80 ribu ton.

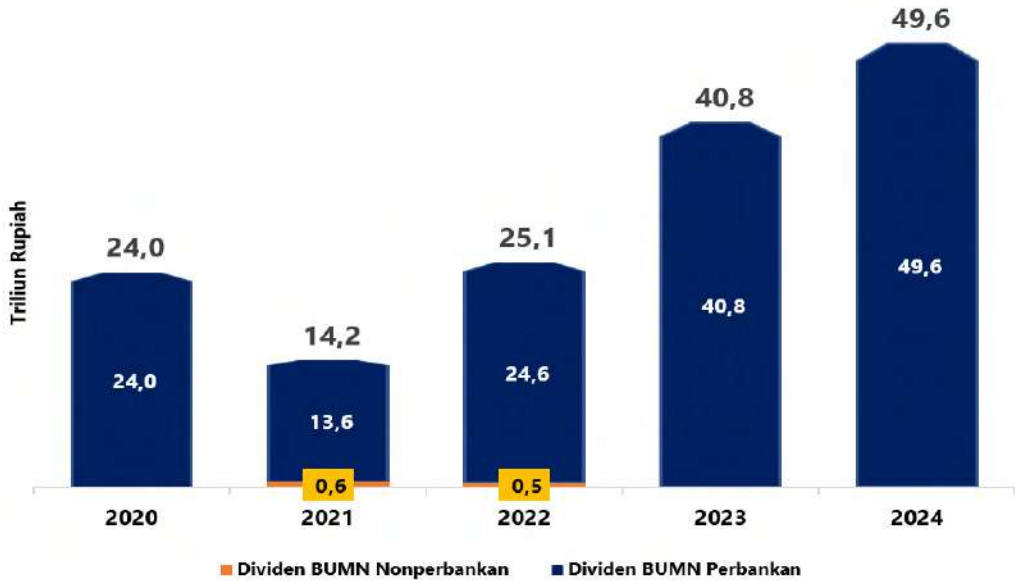
Selanjutnya, capaian sektor Panas Bumi tercatat Rp440,69 miliar, tercapai 20,26 persen dari target. Realisasi ini tumbuh 70,60 persen (yoy) yang disebabkan meningkatnya Setoran Bagian Pemerintah (SBP) 49,75 persen dibandingkan periode yang sama pada tahun lalu dari anak perusahaan milik pemerintah yang bergerak di bidang energi.

Realisasi Pendapatan KND mencapai Rp49,59 triliun, 57,77 persen dari target. Perekonomian nasional yang pulih pada 2023 mendatangkan profit signifikan bagi BUMN khususnya BUMN Perbankan. Kontributor utama capaian Pendapatan KND April 2024 berasal dari pembayaran dividen Bank Himbara tahun buku 2023. Peningkatan laba bersih BUMN tersebut terutama berasal dari pertumbuhan kredit dan pembiayaan. Kondisi perekonomian Indonesia yang stabil dan kondusif, peningkatan volume trafik barang dan penumpang, aktivitas bisnis yang pulih dari dampak Pandemi Covid-19, serta upaya restrukturisasi dan langkah transformasi pengelolaan BUMN yang intens dijalankan oleh Kementerian BUMN dalam beberapa tahun terakhir, BUMN berhasil mencatatkan kinerja yang baik.

Capaian realisasi PNBP Lainnya mencapai Rp53,87 triliun, 46,79 persen dari target. Kinerja PNBP Lainnya melambat 5,52 persen (yoy) disebabkan kontraksi atas Pendapatan Penjualan Hasil Tambang (PHT) dampak penurunan HBA batubara. Meski Pendapatan PNBP K/L tumbuh positif, namun belum mampu menutupi pelambatan Pendapatan PHT.

Pendapatan PNBP K/L mencapai Rp42,73 triliun, 53,01 persen dari target. Capaian ini tumbuh sebesar 8,07 persen (yoy) yang terutama berasal dari pendapatan non layanan berupa denda dari Kementerian ESDM (mayoritas berasal dari denda dana kompensasi batubara). Di samping itu, terdapat pendapatan layanan yang tumbuh positif antara lain pendapatan jasa transportasi pada Kementerian Perhubungan (berasal dari jasa kepelabuhan dan penggunaan prasarana perkeretaapian milik pemerintah), pendapatan jasa layanan administrasi hukum pada Kemenkumham (seperti pendapatan

**Perkembangan Pendapatan KND
Periode Januari sampai dengan April, 2020–2024**



visa dan paspor), serta pendapatan jasa tenaga, pekerjaan, dan informasi pada Kemen ESDM (utamanya disumbang dari Kompensasi Dana Informasi yang merupakan kewajiban yang harus dibayarkan oleh perusahaan pemenang lelang yang akan mengoperasikan Wilayah Izin Usaha Pertambangan atau Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus untuk mineral logam dan Batubara). Kenaikan pendapatan PNBP ini adalah buah dari sinergi antara kerja keras jajaran K/L dan partisipasi aktif masyarakat.

Inovasi layanan publik dan reformasi tata kelola menjadi kunci utama dalam mendorong peningkatan pendapatan dan kepatuhan formal. Inovasi Aplikasi Visa (evisa.imigrasi.go.id) merupakan salah satu inovasi yang mendorong kenaikan kinerja PNBP. Aplikasi baru tersebut yang memungkinkan akses langsung dan pembayaran PNBP oleh orang asing (OA) dari luar

negeri. Sebelumnya, hanya penjamin yang dapat mengakses aplikasi permohonan. Melalui perbaikan tata kelola dan perbaikan sistem layanan tersebut berdampak pada kenaikan volume dan pendapatan dari sisi pelayanan administrasi dan hukum.

Selanjutnya, realisasi Pendapatan PHT mencapai Rp11,14 triliun atau 40,23 persen dari target. Capaian ini mengalami pelambatan disebabkan oleh penurunan HBA.

Realisasi Pendapatan BLU mencapai Rp24,01 triliun, 28,81 persen dari target. Capaian tersebut didominasi dari pendapatan Non Kelapa Sawit yang tumbuh 33,31 persen (yoy) terutama bersumber dari jasa pelayanan Rumah Sakit di beberapa K/L, pendapatan jasa pelayanan pendidikan, dan pendapatan jasa pengelolaan kawasan otorita. Sementara itu, Pendapatan BLU Sawit mencapai Rp6,60 triliun atau terkoreksi 22,33 persen (yoy).

Halaman Ini Dikосongkan

**Realisasi BPP
Terutama
Dimanfaatkan
untuk Penyaluran
Bantuan Masyarakat,
Pelaksanaan Pemilu,
serta Pemenuhan
Kewajiban
Pemerintah**



Foto: Storypost - Ahmad Sahlul

Belanja Pemerintah Pusat

Realisasi BPP sampai dengan 30 April 2024 mencapai Rp591,73 triliun (23,98 persen terhadap pagu atau tumbuh 13,21 persen (yoy). Realisasi tersebut terutama digunakan untuk penyaluran bantuan kepada masyarakat termasuk bantuan sosial serta pelaksanaan dan pengawasan Pemilu. Selain itu, realisasi BPP juga dimanfaatkan untuk pembayaran kewajiban pemerintah seperti pembayaran gaji dan tunjangan pegawai serta pembayaran manfaat pensiun termasuk THR.

BELANJA K/L

Realisasi Belanja K/L mencapai Rp304,17 triliun atau 27,88 persen

dari pagu, tumbuh 18,03 persen (yoy) yang terutama dimanfaatkan untuk penyaluran Program Keluarga Harapan (PKH), penyaluran bantuan sembako, penyaluran Program Indonesia Pintar (PIP), pembayaran PBI JKN, pembangunan infrastruktur, pelaksanaan Pemilu 2024, pembayaran THR ASN/TNI/POLRI, serta pemeliharaan barang milik negara.

Belanja Pegawai terealisasi Rp96,24 triliun atau 33,67 persen dari pagu, tumbuh 19,54 persen (yoy). Realisasi Belanja Pegawai tersebut digunakan untuk pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN/TNI/POLRI, termasuk pembayaran THR ASN/TNI/Polri.

**Realisasi Belanja Pemerintah Pusat
s.d 30 April 2024 (dalam triliun Rupiah)**

Belanja Pemerintah Pusat	APBN	Realisasi sd April	% thd APBN	Growth (%)
Belanja K/L	1.090,83	304,17	27,88	18,03
Belanja Pegawai	285,80	96,24	33,67	19,54
Belanja Barang	405,26	109,66	27,06	30,30
Belanja Modal	247,47	42,80	17,30	19,15
Bantuan Sosial	152,30	55,46	36,42	(2,90)
Belanja Non-K/L	1.376,70	287,56	20,89	8,52
a.l Belanja Pegawai	198,63	72,09	36,29	16,64
Subsidi	285,97	51,82	18,12	(16,47)
Belanja Lain-Lain	388,04	1,99	0,51	37,73
Total	2.467,53	591,73	23,98	13,21

Belanja Barang terealisasi Rp109,66 triliun atau 27,06 persen dari pagu, tumbuh sebesar 30,30 persen (yoy). Peningkatan tersebut terutama karena penyaluran dana BOS, serta pelaksanaan dan pengawasan kegiatan Pemilu 2024. Realisasi Belanja Barang juga dimanfaatkan antara lain untuk: (1) Pembayaran honorarium Badan Adhoc dan Pengawas Adhoc, pemungutan dan penghitungan suara, pengadaan Barang/Jasa/Logistik Pemilu 2024 oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU); (2) Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) Matra Darat, Laut, Udara dan Umum Integratif, pengadaan dan pemeliharaan alutsista dan nonalutsista, operasi pertahanan, dan pelayanan Kesehatan oleh Kementerian Pertahanan (Kemhan); (3) Dukungan logistik/sarpras, pelaksanaan operasi kepolisian, pengembangan perbekalan umum, dan pelayanan keamanan bidang lintas oleh POLRI; (4) penyaluran dana BOS, serta Peningkatan mutu dan relevansi

pendidikan oleh Kementerian Agama (Kemenag); serta (5) Preservasi dan peningkatan kapasitas jalan nasional, operasi dan pemeliharaan sarpras SDA dan penanggulangan darurat akibat bencana, serta penyelenggaraan permukiman dan bangunan gedung oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemen PUPR).

Realisasi Belanja Modal mencapai Rp42,80 triliun atau 17,30 persen dari pagu, tumbuh sebesar 19,15 persen (yoy) yang dipengaruhi a.l. oleh pengadaan sarana dan prasarana bidang hankam oleh POLRI dan Kementerian Pertahanan (Kemhan). Kinerja realisasi Belanja Modal dimanfaatkan antara lain untuk: (1) belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan untuk pembangunan jalan, jembatan, dan prasarana bidang sumber daya air dan irigasi oleh Kemen PUPR, dan pembangunan prasarana konektivitas laut, udara, dan perkeretaapian oleh Kementerian Perhubungan (Kemenhub);

(2) belanja modal peralatan dan mesin untuk pengadaan sarana dan prasarana bidang hankam oleh POLRI dan Kementerian Pertahanan (Kemenhan), dan pengadaan peralatan intelijen oleh BIN dan Kejaksaan; dan (3) belanja modal gedung dan bangunan untuk pembangunan rumah sakit oleh Kementerian Kesehatan (Kemenkes), rumah susun ASN/TNI/Polri oleh Kemen PUPR, dan pembangunan terminal (bandara, pelabuhan, kontainer/kendaraan) oleh Kemenhub.

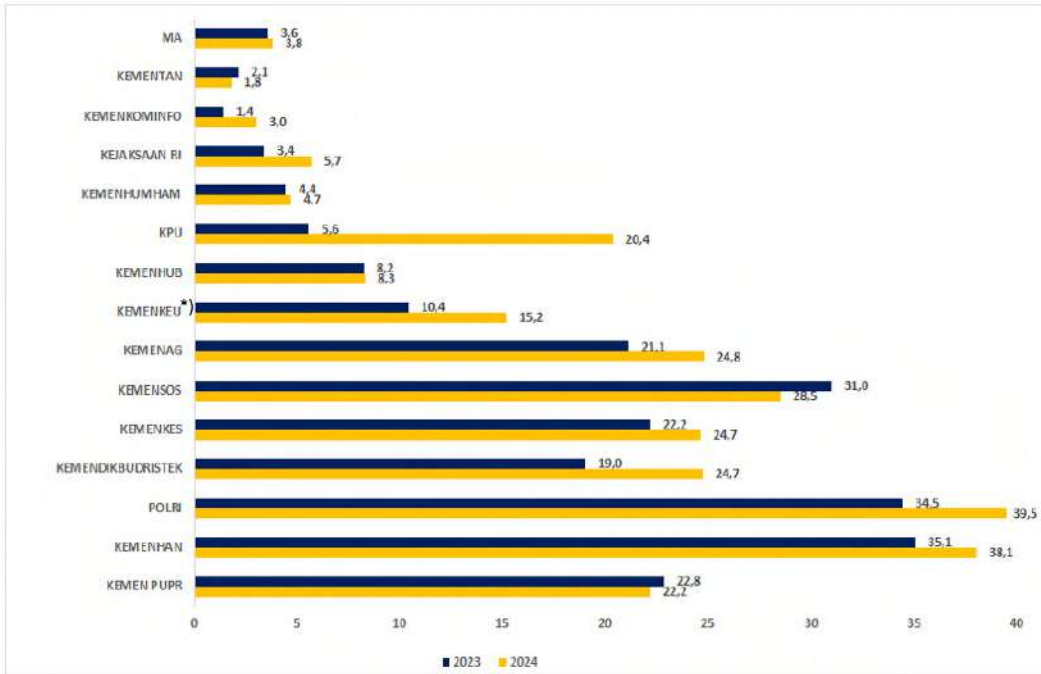
Realisasi Belanja Bantuan Sosial (Bansos) mencapai Rp55,46 triliun atau 36,42 persen dari pagu, turun sebesar 2,90 persen (yoy) terutama disebabkan oleh penyaluran bantuan PKH tahap II rahun 2024 yang belum sepenuhnya tersalurkan. Realisasi belanja Bansos antara lain dimanfaatkan untuk: (1) penyaluran bantuan PKH bagi 10 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM); (2) penyaluran bantuan program kartu sembako bagi 18,7 juta KPM; (3) penyaluran bantuan iuran bagi 96,7 juta peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN); (4) penyaluran bantuan PIP bagi 9,4 juta siswa dan bantuan Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah bagi 778,0 ribu mahasiswa; serta (5) pelaksanaan tanggap darurat bencana oleh BNPB.

Dari perspektif organisasi, realisasi Belanja K/L terutama disumbangkan oleh 15 K/L dengan pagu terbesar yang mewakili 87,2 persen dari total realisasi belanja K/L. Realisasi tersebut terutama didorong antara lain oleh realisasi pada Kemensos, Kemenag, Kemendikudristek, Kemenkes, POLRI, Kemenhan, KPU, dan Kemen PUPR.



Realisasi BPP dimanfaatkan antara lain untuk pembayaran gaji dan tunjangan pegawai serta pembayaran manfaat pensiun termasuk THR, pembayaran honorarium Badan Adhoc dan Pengawas Adhoc, maupun pembayaran BOS sehingga mendorong pertumbuhan konsumsi pemerintah dalam PDB.

**Realisasi Belanja 15 Kementerian/Lembaga
Dengan Pagu Terbesar s.d 30 April
TA 2023–2024 (Triliun Rupiah)**



* Realisasi Kemenkeu termasuk realisasi BLU BPD PKS

BELANJA NON-K/L

Realisasi Belanja Non-K/L mencapai Rp287,56 triliun atau 20,89 persen dari pagu, tumbuh 8,52 persen (yoy). Realisasi Belanja Non-K/L tersebut terutama digunakan untuk pembayaran manfaat pensiun dan penyaluran subsidi. Belanja Pegawai NonK/L terealisasi Rp72,09 triliun atau 36,29 persen dari pagu, tumbuh sebesar 16,64 persen (yoy) antara lain digunakan untuk pemenuhan kewajiban pemerintah terhadap para pensiunan ASN/TNI/POLRI, termasuk pembayaran THR pensiunan ASN/TNI/POLRI.

Realisasi Belanja Subsidi mencapai Rp51,82 triliun, atau 18,12 persen dari pagu, turun sebesar 16,47 persen (yoy) terutama disebabkan proses administrasi penagihan dan pencairan subsidi non energi (subsidi pupuk dan subsidi bunga KUR). Realisasi tersebut terdiri atas: (a) Subsidi Energi Rp42,41

triliun, mencakup Subsidi BBM, Subsidi LPG Tabung 3 Kg, dan Subsidi Listrik; dan (b) Subsidi Nonenergi Rp9,41 triliun, terutama untuk Public Service Obligation Rp0,52 triliun, Subsidi Bunga Kredit Program Rp7,02 triliun, dan Subsidi Pajak Rp1,87 triliun. Realisasi pembayaran Subsidi Energi tersebut untuk penyaluran BBM bersubsidi 4,3 juta KL, LPG Tabung 3 Kg 2,0



Realisasi Belanja Subsidi dimanfaatkan untuk memperkuat daya beli masyarakat.

juta MT, pelanggan listrik bersubsidi sejumlah 40,3 juta pelanggan, dan volume konsumsi listrik bersubsidi 17,1 TWh. Realisasi Subsidi Nonenergi terutama dimanfaatkan untuk Subsidi Bunga KUR kepada 1,55 juta debitur dan plafon penyaluran KUR Rp90,55 triliun, subsidi bantuan uang muka (SBUM) perumahan untuk 20,86 ribu unit rumah bersubsidi, serta penyaluran pupuk bersubsidi 1,7 juta ton.

Realisasi Belanja Lain-Lain mencapai Rp1,99 triliun atau 0,51 persen dari pagu, tumbuh 37,73 persen dari tahun sebelumnya. Realisasi tersebut dimanfaatkan terutama untuk Program Kartu Prakerja sebesar Rp1,30 triliun bagi 326,82 ribu peserta.

Penyaluran TKD Telah
Terealisasi Rp257,52
Triliun atau 30,03
Persen dari Pagu



Transfer ke Daerah

Realisasi TKD sampai dengan 30 April 2024 mencapai Rp257,52 triliun atau 30,37 persen dari pagu. Sebagian dana TKD belum disalurkan karena masih menunggu penyampaian syarat salur dan/atau belum masuk jadwal penyaluran.

DANA BAGI HASIL

Sampai dengan akhir April 2024, penyaluran DBH mencapai Rp40,57 triliun atau 28,35 persen dari pagu. Capaian tersebut disebabkan oleh kenaikan pagu DBH SDA Minerba 2024 yang mencapai 24,6 persen (yoy).



Realisasi TKD sampai dengan 30 April 2024 mencapai Rp257,52 triliun atau 30,37 persen dari pagu.

Realisasi TKD T.A. 2023 & 2024
Tanggal: 1 Januari – 30 April 2024

dalam miliar Rupiah

Uraian	TA 2023			TA 2024			
	APBN	Realisasi	% thd APBN	APBN	Realisasi	% thd APBN	% YoY Nom (2023-24)
Transfer ke Daerah	814.718,5	171.340,7	21,03	857.591,7	184.321,7	21,49	7,58
Dana Bagi Hasil	136.260,0	22.249,7	16,33	143.099,9	24.116,8	16,85	8,39
Dana Alokasi Umum	396.000,0	104.209,8	26,32	427.699,3	111.600,5	26,09	7,09
Dana Alokasi Khusus	185.797,3	31.526,9	16,97	188.101,0	31.272,2	16,63	-0,81
1. DAK Fisik	53.422,5	170,6	0,32	53.822,5	0,0	0,00	-100,00
2. DAK Nonfisik	130.297,3	31.322,6	24,04	133.764,6	31.272,2	23,38	-0,16
3. Hibah ke Daerah	2.077,5	33,7	1,62	513,9	0,0	0,00	-100,00
Dana Otonomi Khusus	17.241,3	0,0	0,00	18.271,5	0,0	0,00	
Dana Keistimewaan DIY	1.420,0	165,7	11,67	1.420,0	213,0	15,00	28,55
Dana Desa	70.000,0	13.032,2	18,62	71.000,0	16.854,4	23,74	29,33
Insentif Fiskal	8.000,0	156,4	1,96	8.000,0	264,7	3,31	69,25

DANA ALOKASI UMUM

Realisasi penyaluran DAU pada akhir April 2024 mencapai Rp147,52 triliun atau 34,49 persen dari pagu. Penyaluran tersebut terutama dikontribusikan oleh peningkatan porsi DAU Block Grant.

DANA TRANSFER KHUSUS

Dana Alokasi Khusus Fisik (DAK Fisik) belum terdapat realisasi penyaluran. Hal ini disebabkan karena saat ini pemerintah daerah dalam proses penyiapan pelaksanaan kegiatan DAK Fisik, yang di antaranya tahapan penetapan kontrak pengadaan barang dan jasa, yang rentang waktu penyaluran

DAK Fisik tahap I paling lambat dilakukan sampai dengan Juli 2024.

Strategi percepatan penyaluran DAK Fisik telah dilakukan di antaranya melalui percepatan proses penerbitan peraturan presiden tentang petunjuk teknis, mendorong pemda untuk percepatan proses pengadaan barang dan jasa, sosialisasi dan bimbingan teknis dalam rangka: (i) meningkatkan pemahaman regulasi pengelolaan DAK Fisik terutama terkait tata kelola penyaluran DAK Fisik, (ii) meningkatkan kualitas dan integritas SDM pengelola keuangan daerah termasuk APIP Daerah, dan (iii) penguatan koordinasi antarlevel pemerintahan dan

internal pemerintah daerah agar pemanfaatan DAK Fisik lebih optimal.

Sementara itu, DAK Nonfisik telah disalurkan Rp41,33 triliun atau 30,90 persen dari pagu. Capaian tersebut terutama karena di Januari telah dilakukan penyaluran Tahap I Dana BOSP yang terdiri atas Dana BOS, Dana BOP PAUD, dan Dana BOP Kesetaraan. Selain itu, terdapat perbaikan tata kelola penyampaian data BOS di daerah dan di Kemendikbudristek. Untuk Februari s.d April 2024 telah dilakukan penyaluran beberapa jenis DAK Nonfisik antara lain untuk Tunjangan Guru ASND, Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak, Dana Bantuan Operasional Kesehatan, dan Dana Penguatan Kapasitas Kelembagaan SIKM untuk Tahap I sesuai ketentuan.

Sedangkan realisasi penyaluran Hibah kepada Daerah pada akhir April 2024 mencapai 11,5 miliar atau 2,24 persen dari pagu. Capaian tersebut dipengaruhi oleh penyaluran hibah *Rural Empowerment and Agricultural Development Scaling-up Initiative* (READSI) yang merupakan luncuran dari kegiatan tahun sebelumnya.

DANA OTONOMI KHUSUS DAN DANA KEISTIMEWAAN D.I. YOGYAKARTA

Sampai dengan akhir April 2024, realisasi Dana Otonomi Khusus telah mencapai Rp1,63 triliun atau 8,39 persen dari pagu, naik 37,3 persen (yoy). Kenaikan tersebut terutama disebabkan oleh peningkatan kepatuhan Pemda dalam menyampaikan dokumen syarat salur Dana Otonomi Khusus Tahap I secara tepat waktu. Di samping itu, kenaikan realisasi Dana Otonomi Khusus sampai dengan akhir April 2024



Terdapat kenaikan jumlah daerah yang sudah mendapat realisasi penyaluran Insentif Fiskal sampai dengan akhir April 2024, dari semula 48 daerah di 2023 menjadi 61 daerah di 2024.

juga disebabkan oleh: 1) peningkatan pagu alokasi Dana Otonomi Khusus pada 2024 yang mencapai 5,97 persen (yoy), 2) pelaksanaan rapat koordinasi dalam rangka mendorong percepatan penyaluran Dana Otonomi Khusus bersama dengan Provinsi Aceh, Pemda di wilayah Papua, dan Kementerian Dalam Negeri; dan 3) pelaksanaan bimbingan teknis dan asistensi kepada pemda terkait pemenuhan dokumen syarat salur Dana Otonomi Khusus tahap I.

Penyaluran Dana Otonomi Khusus Tahap I 2024 (30 persen pagu alokasi masing-masing daerah penerima) dilakukan setelah pemda menyampaikan dokumen syarat salur berupa: 1) laporan tahunan pelaksanaan pengelolaan penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus 2023, dan 2) hasil validasi atas integrasi RAP dengan APBD 2024, diterima paling lambat pada akhir April 2024.

Sementara itu, Dana Keistimewaan 2024 Tahap I telah disalurkan Rp213 miliar atau 15 persen dari pagu. Sesuai amanat PMK Nomor 163/2023 tentang Pengelolaan Dana Keistimewaan DIY, penyaluran Dana Keistimewaan memperhitungkan sisa dana tahun anggaran sebelumnya Rp23,84 miliar, sehingga nilai bersih transfer Tahap I dari RKUN ke RKUD Rp189,16 miliar.

DANA DESA

Sampai dengan periode ini, Dana Desa telah disalurkan Rp25,77 triliun atau 36,29 persen dari pagu. Capaian tersebut dipengaruhi oleh redesign penyaluran Dana Desa melalui pemisahan penyaluran Dana Desa earmarked (penanganan kemiskinan ekstrem melalui BLT Desa, program ketahanan pangan dan hewani, serta program pencegahan dan penurunan *stunting*) dan *non-earmarked* berdasarkan kinerja pelaksanaan, pemberian reward berupa persentase penyaluran Dana Desa non-earmarked tahap I lebih besar untuk Desa berstatus Mandiri. Kenaikan jumlah Desa berstatus Mandiri juga berkontribusi dalam meningkatkan kinerja capaian penyaluran karena besaran persentase penyaluran Desa Mandiri lebih tinggi dibandingkan dengan Desa nonMandiri. Selain itu, terjadi peningkatan kepatuhan penyampaian syarat penyaluran oleh pemerintah daerah dan desa sehingga kinerja penyaluran Dana Desa membaik.

INSENTIF FISKAL

Sampai dengan akhir April 2024, Insentif Fiskal (IF) telah disalurkan Rp475,6 miliar atau 5,95 persen dari pagu, turun 7,88 persen (yoy). Meski secara nominal rupiah mengalami penurunan, namun terdapat kenaikan jumlah daerah yang sudah mendapat realisasi penyaluran IF s.d. akhir

April 2024, dari semula 48 daerah di 2023 menjadi 61 daerah di 2024. Hal tersebut tidak lepas dari upaya sosialisasi dan koordinasi yang dilakukan kepada daerah penerima alokasi untuk mengakselerasi penyampaian laporan-laporan yang menjadi syarat salur IF 2024.

Angka realisasi penyaluran IF di atas berasal dari penyaluran tahap I IF 2024 atas kinerja tahun sebelumnya kepada daerah penerima alokasi IF yang telah memenuhi dokumen syarat salurnya. Penyaluran dimaksud dilakukan 50 persen dari pagu alokasi yang diperoleh setelah daerah menyampaikan syarat salur berupa Perda APBD 2024, rencana penggunaan IF 2024, dan/atau laporan realisasi penyerapan IF 2023 bagi daerah yang memperoleh alokasi di 2023.

Halaman Ini Dikosongkan

**Pembiayaan
Utang *On Track*
dan *Manageable*
Mendukung
Konsolidasi
untuk Menjaga
Kesinambungan
Fiskal**

Foto: Kemenkeu - Resha Aditya

Pembiayaan Utang

Defisit APBN 2024 ditargetkan 2,29 persen dari PDB, dengan realisasi hingga akhir April 2024 terkendali dalam batas aman (*prudent*) tercatat positif 0,33 persen dari PDB (surplus). Penetapan defisit APBN tidak lepas dari keputusan pemerintah menerapkan kebijakan fiskal ekspansif. Kebijakan ekspansif dilakukan dengan terukur, terarah, dan konsisten untuk menjaga pertumbuhan ekonomi dan melindungi daya beli masyarakat sehingga kondisi fiskal terjaga tetap sehat dan berkelanjutan.

Pembiayaan utang menjadi salah satu instrumen untuk menutupi defisit tersebut, dan dijalankan secara hati-hati, fleksibel, oportunistik dan akuntabel. Realisasi pembiayaan

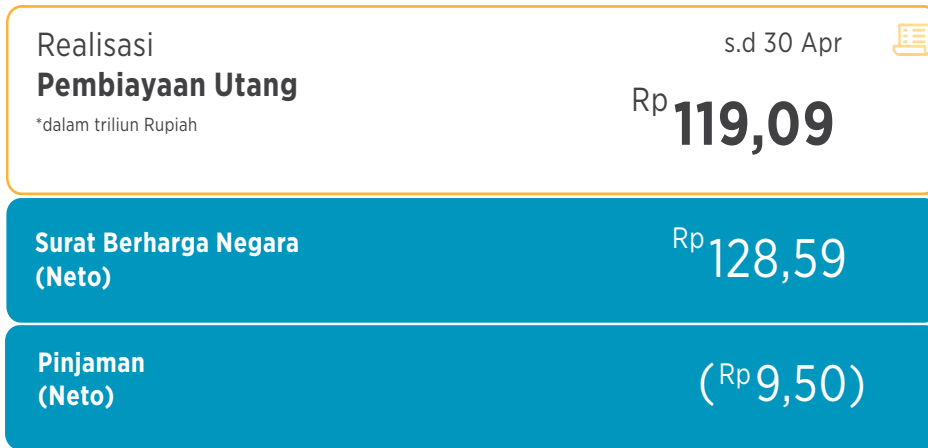
utang sampai dengan akhir April 2024 mencapai Rp119,09 triliun atau 18,4 persen dari target, terdiri atas realisasi SBN (Neto) Rp128,59 triliun dan realisasi Pinjaman (Neto) negatif Rp9,50 triliun (pelunasan pinjaman lebih besar dari penarikan pinjaman baru).

Penerbitan SBN di pasar domestik menjadi prioritas dalam memenuhi kebutuhan pembiayaan APBN untuk mengendalikan risiko. Guna mencapai efisiensi biaya utang, pemerintah berupaya mendorong penciptaan pasar SBN yang dalam, aktif, dan likuid di antaranya melalui lelang SBN domestik secara reguler dengan mekanisme pasar yaitu investor menyampaikan penawaran (*bid*) kompetitif melalui Dealer Utama. Selama April 2024, telah dilaksanakan 2 kali lelang SBN dan sekali lelang SBSN

Pembiayaan Utang

*Data per 30 April 2024

f Pembiayaan utang *on track* dan *manageable* mendukung konsolidasi untuk menjaga kesinambungan fiskal



Pengadaan utang melalui SBN sepanjang bulan April dilakukan melalui 2x lelang reguler setiap hari Selasa dan sekali lelang SBSN Tambahan (*Greenshoe Option*) dengan mencatatkan *bid to cover ratio* sebesar 2,33x. Selain itu, Pemerintah juga telah menetapkan hasil penjualan Sukuk Ritel SR020T3 (tenor 3 tahun) dan SR020T5 (tenor 5 tahun) senilai total Rp21,36 triliun.



Kinerja Lelang SBN

Periode Jan s.d Apr 2024



Rata-rata penawaran yang masuk tiap lelang

Rp **40,68** triliun



Rata-rata nominal dimenangkan tiap lelang

Rp **18,03** triliun

f Pembiayaan utang menjadi salah satu instrumen untuk menutupi defisit, dan dijalankan secara hati-hati, fleksibel, oportunistik dan akuntabel.

Tambahan (*Greenshoe Option*) dengan mencatatkan *bid to cover ratio* 2,33x. Sepanjang 2024 sampai dengan April, rata-rata penawaran yang masuk pada lelang SBN mencapai Rp40,68 triliun/lelang dengan rata-rata nominal yang dimenangkan Rp18,03 triliun/lelang. Penerbitan SBN juga dilakukan melalui *Private Placement* secara terukur yang dilakukan pada 25 April 2024 berupa penerbitan SBSN seri SW007.

Selain itu, sebagai bagian dari upaya pemerintah untuk memperdalam pasar keuangan domestik serta memperluas basis investor, khususnya investor ritel serta mendukung peralihan masyarakat dari *saving society* menjadi *investment society*, pemerintah melakukan penerbitan SBN Ritel. Pada April, pemerintah telah menetapkan hasil penjualan Sukuk Ritel SRO20T3 (tenor 3 tahun) dan SRO20T5 (tenor 5 tahun) dengan total Rp21,36 triliun. Kedua seri SBN ritel ini berhasil menarik minat investor baru yaitu SRO20T3 sebanyak 13.480 dan SRO20T5 sebanyak 2.559. Lebih lanjut, penawaran SRO20T3 dan SRO20T5 juga menarik bagi investor milenial, dengan jumlah investor *milenial* mendominasi baik untuk SRO20T3 (48,19 persen) maupun SRO20T5 (56,09 persen).

Sementara itu, ditinjau dari posisi utang pemerintah yang outstanding, jumlah utang pemerintah per akhir April 2024 adalah sebesar Rp8.338,43 triliun. Selaras dengan kebijakan umum pembiayaan utang untuk mengoptimalkan sumber pembiayaan dalam negeri dan memanfaatkan utang luar negeri sebagai pelengkap, mayoritas utang pemerintah berasal dari dalam negeri dengan proporsi 71,18 persen. Sementara berdasarkan instrumen, komposisi utang pemerintah sebagian besar berupa SBN yang mencapai 87,94 persen.



Penerbitan SBN di pasar domestik menjadi prioritas dalam memenuhi kebutuhan pembiayaan APBN untuk mengendalikan risiko.

Pasar SBN yang efisien akan meningkatkan daya tahan sistem keuangan Indonesia terhadap guncangan ekonomi dan pasar keuangan. Dengan aktivitas pembiayaan utang melalui penerbitan SBN, pemerintah turut mendukung pengembangan dan pendalaman pasar keuangan domestik. SBN turut menyediakan referensi untuk menentukan harga instrumen pasar keuangan lainnya dan digunakan oleh para pelaku pasar untuk mengelola risiko suku bunga.

Per akhir April 2024, lembaga keuangan memegang sekitar 43,3 persen kepemilikan SBN domestik, terdiri dari perbankan 24,5 persen dan perusahaan asuransi dan dana pensiun sebesar 18,8 persen. Bagi lembaga keuangan, SBN berperan penting dalam memenuhi kebutuhan investasi dan pengelolaan likuiditas, serta menjadi salah satu instrumen mitigasi risiko. Kepemilikan SBN domestik oleh Bank Indonesia sekitar 21,3 persen yang antara lain digunakan sebagai

Komposisi Utang

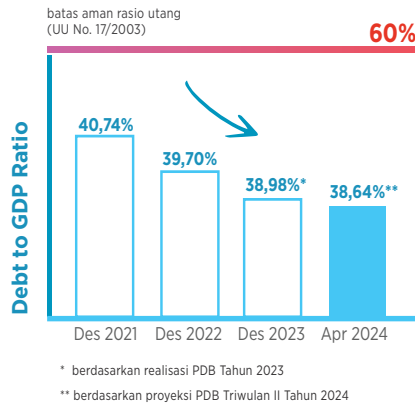
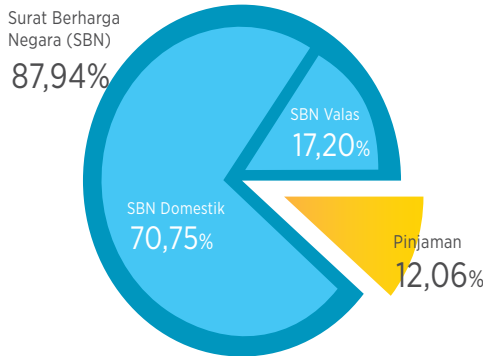
***Data per 30 April 2024**

i Pemerintah mengelola utang secara cermat dan terukur untuk mencapai portofolio utang yang optimal dan mendukung pengembangan pasar keuangan domestik

Posisi Utang

Rp **8.338,43**
*dalam triliun Rupiah

Debt to GDP
38,64%



Surat Berharga Negara
Rp **7.333,11**
*dalam triliun Rupiah

- Domestik** Rp 5.899,20
 - Surat Utang Negara Rp 4.714,08
 - Surat Berharga Syariah Negara Rp 1.185,12
- Valas** Rp 1.433,90
 - Surat Utang Negara Rp 1.077,05
 - Surat Berharga Syariah Negara Rp 356,85

Pinjaman
Rp **1.005,32**
*dalam triliun Rupiah

- Pinjaman DN*** Rp 36,04
- Pinjaman LN*** Rp 969,28
 - Bilateral Rp 266,24
 - Multilateral Rp 586,13
 - Commercial Banks Rp 116,91
 - Suppliers Rp -

instrumen pengelolaan moneter. Sementara, asing hanya memiliki SBN domestik sekitar 13,8 persen termasuk kepemilikan oleh pemerintah dan bank sentral asing. Sejalan dengan upaya pemerintah memperluas basis investor, inklusi keuangan dan peningkatan literasi keuangan masyarakat dari savings society menjadi investment society, kepemilikan investor individu di SBN domestik terus mengalami peningkatan sejak 2019 yang hanya di bawah 3 persen menjadi 8,4 persen per akhir April 2024. Sisa kepemilikan SBN domestik dipegang oleh institusi domestik lainnya untuk memenuhi kebutuhan investasi dan pengelolaan keuangan institusi bersangkutan.

Selanjutnya, guna meningkatkan efisiensi pengelolaan utang dalam jangka panjang, pemerintah terus berupaya mewujudkan pasar SBN domestik yang dalam, aktif, dan likuid. Salah satu strateginya adalah melalui pengembangan berbagai instrumen SBN, termasuk pula pengembangan SBN tematik berbasis lingkungan (*Green Sukuk*) dan SDGs (*SDG Bond* dan *Blue Bond*). Peranan transformasi digital dalam proses penerbitan dan penjualan SBN yang didukung dengan sistem online juga tak kalah penting, mampu membuat pengadaan utang melalui SBN menjadi semakin efektif dan efisien, serta kredibel.

Pengelolaan portofolio utang berperan besar dalam menjaga kesinambungan fiskal secara keseluruhan. Oleh karena itu, pemerintah konsisten mengelola utang secara cermat dan terukur dengan menjaga risiko suku bunga, mata uang, likuiditas, dan jatuh tempo yang optimal.

Rasio utang per akhir April 2024 yang sebesar 38,64 persen terhadap PDB, tetap konsisten terjaga di bawah batas aman 60 persen PDB sesuai UU Nomor 17/2003 tentang Keuangan Negara, dan menurun dari angka rasio utang terhadap PDB bulan sebelumnya yang mencapai 38,79 persen, serta lebih baik dari yang telah ditetapkan melalui Strategi Pengelolaan Utang Jangka Menengah tahun 2024–2027 di kisaran 40 persen. Selain itu, pemerintah mengutamakan pengadaan utang dengan jangka waktu menengah–panjang dan melakukan pengelolaan portofolio utang secara aktif. Per akhir April 2024, profil jatuh tempo utang pemerintah terhitung cukup aman dengan rata-rata tertimbang jatuh tempo (*average time maturity/ATM*) di 8 tahun.

Pengelolaan utang yang disiplin turut menopang hasil asesmen lembaga pemeringkat kredit (S&P, Fitch, Moody's, R&I, dan JCR) yang hingga saat ini tetap mempertahankan rating sovereign Indonesia pada level investment grade di tengah dinamika perekonomian global dan volatilitas pasar keuangan. Pada 16 April 2024, lembaga pemeringkat Moody's kembali mempertahankan Sovereign Credit Rating Indonesia pada peringkat Baa2, satu tingkat di atas investment grade, dengan outlook stabil. Moody's memandang afirmasi ini sejalan dengan hasil asesmen bahwa ketahanan ekonomi Indonesia tetap terjaga didukung oleh pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan stabil.

Calendar Events 2024



Penyusunan Kapasitas Fiskal
(*Resource Envelope*)
Penawaran SBN Ritel ORI025
Lomba Debat APBN - Mahasiswa
DJA Menyapa

Penyampaian Pagu
Indikatif RAPBN 2025
Penawaran SBN Ritel ST012
Lomba Debat APBN
- Mahasiswa
Lomba Konten APBN - SMP

Pembicaraan Pendahuluan
RAPBNTA 2025
Penyampaian Pagu
Anggaran RAPBN 2025
Penawaran SBN Ritel SBR013
Penawaran SBN
Ritel SWR005



Penawaran SBN Ritel ORI025
DJA Menyapa

Penyusunan Kapasitas Fiskal
Penyampaian Pagu
Indikatif RAPBN 2025
Penawaran SBN Ritel SRO20
Lomba Debat APBN - Mahasiswa
Budget Goes to Campus

Penyampaian Dokumen
KEM PPFTA 2025
Penawaran SBN Ritel ST012
Penawaran SBN Ritel SBR013
Lomba Debat APBN - Mahasiswa
Lomba Konten APBN - SMP



Pidato Presiden dalam rangka
Penyampaian RUU APBN
2025 dan Nota Keuangan
Penawaran SBN Ritel SR021
Lomba Cerdas Cermat APBN - SMA
Lomba Video Mengajar
APBN - Guru SMA/SMP

Pembahasan RUU APBN
2025 dan Nota Keuangan
Penetapan Peraturan Presiden
tentang Rincian APBN TA 2025
Penawaran SBN Ritel ORIO26
Lomba Video Mengajar
APBN - Guru SMA/SMP
Budget Goes to Campus
HORI 78 Tahun 2024

DJA Menyapa
Penawaran SBN Ritel ST013

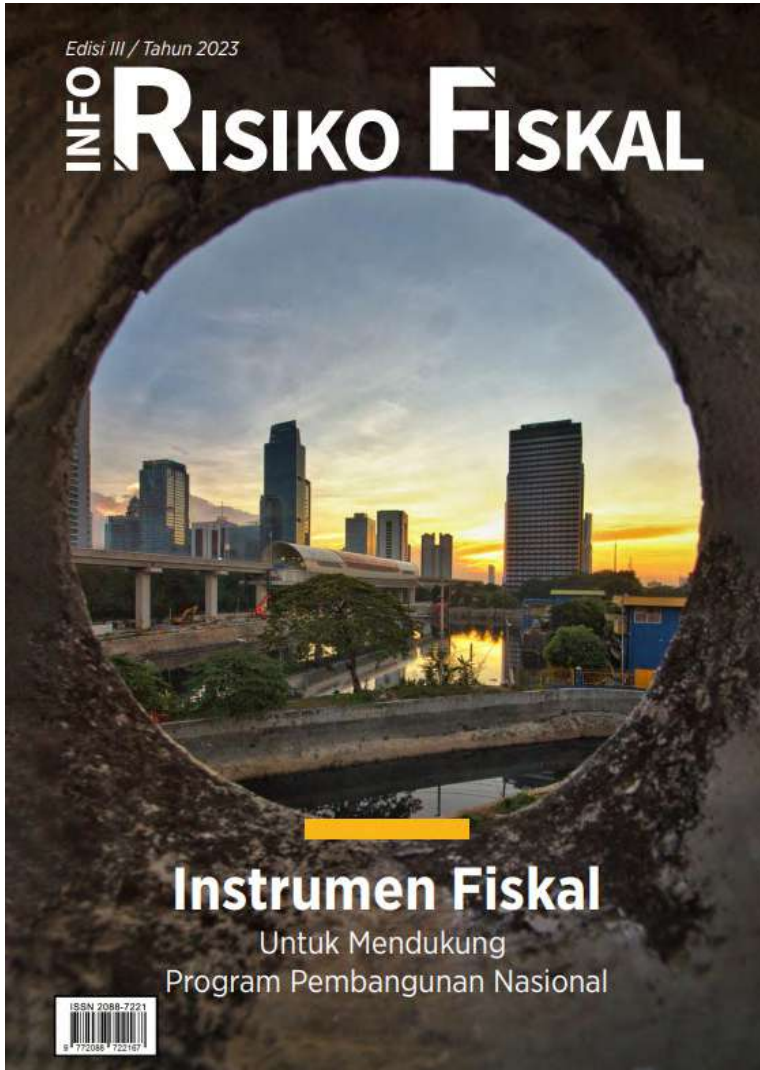


Penyampaian Pagu
Anggaran RAPBN 2025
Penawaran SBN Ritel SBR013
Penawaran SBN Ritel SWR005
Lomba Cerdas Cermat
APBN - SMA
Lomba Video Mengajar
APBN - Guru SMA/SMP
Budget Goes to Campus

Pembahasan RUU APBN
2025 dan Nota Keuangan
Penawaran SBN Ritel SR021
Penawaran SBN Ritel ORIO26
Lomba Cerdas Cermat APBN - SMA
Lomba Video Mengajar
APBN - Guru SMA/SMP
DJA Menyapa

Penetapan DIPA Tahun 2025
Penawaran SBN Ritel ST013

POJOK LITERASI



Buletin Info Risiko Fiskal Edisi III-2023

Pemerintah telah menetapkan visi Indonesia emas 2024, saat itu output nasional diperkirakan mencapai USD9,8 triliun, menduduki peringkat lima dunia. Kualitas infrastruktur dan kualitas SDM masih akan menjadi faktor kunci yang menentukan semua semua pentahapan pembangunan nasional berhasil mencapai visi sebagai negara maju di 2045. Infrastruktur yang dibutuhkan tidak saja banyak tetapi juga berkualitas, sementara SDM didominasi oleh yang lebih berkualitas dan produktif dan memiliki daya saing tinggi. Semua itu membutuhkan sinergi kebijakan di sector riil dengan sector keuangan, antar sector riil dan antar sektor keuangan. Pemerintah dan swasta harus bersinergi dalam membangun proyek-proyek strategis dan menciptakan nilai tambah ekonomi.

Yuk Simak di tautan berikut!

<https://bit.ly/IRF32023>

KEMENKEU



MENGenal PNBp



PODCAST

MENGETAHUI LEBIH DEKAT
PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

• paspor • visa • SIM • sertifikat tanah • dividen

1.0



• sumber daya alam • minyak bumi • gas bumi • batu bara • nikel • emas

MEI
2024



YOUTUBE
DITJEN ANGGARAN

Yuk Kunjungi di tautan berikut!

https://s.id/IntiPNBP_EP1

Laporan Khusus

Selayang Pandang Pengungkapan Ketidakbenaran SPT

Pada dasarnya, sistem pemungutan pajak di Indonesia menganut *self-assessment* dan memberikan kepercayaan kepada Wajib Pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan pajak yang terutang berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan dan sesuai dengan keadaan sebenarnya. Untuk memenuhi kewajiban perpajakannya, Wajib Pajak harus mengisi Surat Pemberitahuan (SPT) dengan benar, lengkap, dan jelas. Direktorat Jenderal Pajak berkewajiban untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kewajiban perpajakan Wajib Pajak melalui tindakan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan sesuai Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP).

Tindakan pemeriksaan ini menutup kesempatan Wajib Pajak untuk melakukan pembetulan SPT yang telah disampaikan. Namun, Wajib Pajak tidak perlu khawatir, sebab meskipun DJP telah melakukan pemeriksaan, Wajib Pajak dengan kesadaran sendiri dapat mengungkapkan tentang ketidakbenaran pengisian SPT yang telah disampaikan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.

Meskipun Wajib Pajak mengungkapkan tentang ketidakbenaran pengisian SPT yang telah disampaikan, proses pemeriksaan tetap dilanjutkan. Sebelum Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) terbit, pengungkapan ketidakbenaran pengisian SPT paling lambat dilakukan sebelum DJP menerbitkan Surat Ketetapan Pajak (SKP). Namun, setelah UU HPP terbit, batas waktunya dipercepat. Pengungkapan



ketidakbenaran pengisian SPT dapat dilakukan sepanjang surat pemberitahuan hasil pemeriksaan (SPHP) belum disampaikan oleh DJP.

Latar belakang dari perubahan batas waktu ini adalah untuk memberikan kepastian hukum dan menghindari kemungkinan pengungkapan ketidakbenaran pengisian SPT oleh pemeriksa pajak tidak dipertimbangkan. Hal ini disebabkan oleh isian dari SPHP harus mencerminkan seluruh pemeriksaan. Apabila pengungkapan dilakukan setelah SPHP disampaikan, akan menyebabkan pengungkapan ketidakbenaran pengisian SPT tersebut tidak mencerminkan nilai atau kondisi yang dilandasi kesadaran Wajib Pajak sendiri atau terdapat kemungkinan pengaruh perhitungan dalam SPHP.

Mekanisme dan Prosedur

Pengungkapan ketidakbenaran pengisian SPT dilakukan oleh Wajib Pajak secara tertulis dalam laporan

tersendiri sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan disampaikan ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat Wajib Pajak terdaftar. Laporan tersendiri tersebut harus ditandatangani oleh Wajib Pajak, wakil, atau kuasa dari Wajib Pajak dan dilampiri dengan:

1. penghitungan pajak yang kurang dibayar sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dalam format SPT;
2. Surat Setoran Pajak (SSP) atas pelunasan pajak yang kurang dibayar apabila pengungkapan ketidakbenaran pengisian SPT mengakibatkan pajak yang kurang dibayar menjadi lebih besar; dan
3. Surat Setoran Pajak atas sanksi administratif berupa bunga sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (5) UU KUP sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU HPP jika pengungkapan ketidakbenaran pengisian SPT mengakibatkan pajak yang kurang dibayar menjadi lebih besar.

Nilai pada SSP atas pelunasan pajak yang kurang dibayar pada angka 2 nantinya diperhitungkan sebagai kredit pajak dalam SKP yang diterbitkan berdasarkan hasil pemeriksaan. Apabila pengungkapan ketidakbenaran pengisian SPT tidak mengakibatkan kekurangan pembayaran pajak, maka pengungkapan tersebut tidak perlu dilampiri dengan SSP.

Pajak yang kurang dibayar yang timbul akibat pengungkapan ketidakbenaran pengisian SPT harus dilunasi Wajib Pajak sebelum laporan tersendiri disampaikan beserta sanksi administrasi berupa bunga sebesar tarif bunga per bulan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan dari pajak yang kurang dibayar, yang dihitung sejak:

1. batas waktu penyampaian SPT Tahunan berakhir sampai dengan tanggal pembayaran, untuk pengungkapan ketidakbenaran pengisian SPT Tahunan; atau
2. jatuh tempo pembayaran berakhir sampai dengan tanggal pembayaran, untuk pengungkapan ketidakbenaran pengisian SPT Masa;

dan dikenakan paling lama 24 bulan, serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 bulan. Tarif bunga per bulan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan dihitung berdasarkan suku bunga acuan ditambah 10 persen dan dibagi 12 yang berlaku pada tanggal dimulainya penghitungan sanksi.

Untuk membuktikan kebenaran pengungkapan ketidakbenaran pengisian SPT, proses pemeriksaan tetap dilanjutkan dan atas hasil pemeriksaan tersebut diterbitkan SKP dengan mempertimbangkan laporan tersendiri serta memperhitungkan pajak yang terutang yang telah dibayar.

Apabila hasil pemeriksaan ternyata membuktikan bahwa pengungkapan ketidakbenaran pengisian SPT oleh Wajib Pajak tidak mencerminkan keadaan yang sebenarnya, SKP diterbitkan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Penerbitan SKP tersebut ditambah dengan sanksi administrasi sesuai dengan Pasal 13 UU KUP sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU HPP. Namun apabila hasil pemeriksaan membuktikan bahwa pengungkapan ketidakbenaran pengisian SPT oleh Wajib Pajak telah sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, SKP diterbitkan sesuai dengan pengungkapan Wajib Pajak.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa meskipun pemeriksaan telah dilakukan, tetapi sepanjang SPHP belum disampaikan, Wajib Pajak masih berkesempatan mengungkapkan ketidakbenaran pengisian SPT. Kesempatan ini selayaknya dimanfaatkan sebaik mungkin oleh Wajib Pajak dengan menunjukkan itikad baik dalam membuat laporan pengungkapan ketidakbenaran pengisian SPT, sehingga laporan tersebut benar-benar mencerminkan keadaan yang sesungguhnya.

Manfaatkan Momen Kebangkitan Nasional, Jaga Integritas, Songsong Kinerja yang Kian Cemerlang

Musim pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan (SPT Tahunan PPh) telah berlalu. Akhir Maret yang lalu merupakan batas akhir penyampaian SPT Tahunan PPh Orang Pribadi. Lantas, akhir April yang lalu adalah batas waktu pelaporan SPT Tahunan PPh Badan.

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mencatatkan capaian jumlah laporan SPT Tahunan yang patut dibanggakan. Per 30 April 2024, batas waktu pelaporan SPT Tahunan PPh Badan yang lalu, sebanyak 14.186.630 wajib pajak telah menunaikan salah satu kewajiban perpajakannya dengan menyampaikan SPT Tahunan. Angka tersebut tumbuh 7,15 persen dibandingkan pelaporan tahun lalu pada periode yang sama (13.240.016 wajib pajak yang melaporkan SPT Tahunan).

Sebanyak 1.044.911 wajib pajak

badan sudah melaporkan SPT Tahunan PPh, atau tumbuh 10,66 persen dibandingkan tahun lalu yang sebesar 944.264 wajib pajak. Sementara itu, sebanyak 13.141.719 wajib pajak orang pribadi telah menyampaikan SPT Tahunan PPh, atau tumbuh 6,88 persen dibandingkan tahun lalu – sebanyak 12.295.752 wajib pajak.

Hal ini menunjukkan bahwa kepatuhan formal wajib pajak meningkat. Fakta yang menggembirakan ini berkat dari partisipasi masyarakat dalam menerapkan asas kegotongroyongan dalam menjalankan hak dan memenuhi kewajiban perpajakan.

Selain itu, DJP juga senantiasa meningkatkan kualitas layanannya, dengan mengembangkan terobosan dan kemudahan dalam mengakses layanan perpajakan. Sarana daring, baik dalam pelaporan maupun dalam konsultasi, telah disiapkan.



Wajib pajak dapat melaporkan SPT Tahunan PPh tanpa perlu bertandang ke kantor pajak. Wajib pajak dapat memanfaatkan sarana *e-filing* untuk menyampaikan laporan pajaknya dari mana saja dan kapan saja, sebelum jatuh tempo.

Dalam melaporkan SPT Tahunan PPh, acap kali wajib pajak lupa *Electronic Filing Identification Number* (EFIN). Nomor unik ini dibutuhkan dalam mengisi formulir SPT Tahunan PPh, pembayaran, dan transaksi lain yang terkait dengan perpajakan. Oleh karena itu, DJP sigap menyediakan layanan lupa EFIN secara daring.

Layanan lupa EFIN untuk wajib pajak orang pribadi, selain dapat datang ke kantor pajak terdekat, juga tersedia melalui telepon Kring Pajak 1500200, live chat di situs web www.pajak.go.id, email lupa.efin@pajak.go.id, serta aplikasi M-Pajak.

Sementara itu, wajib pajak badan diberikan pilihan untuk

datang ke kantor pajak terdaftar, atau memanfaatkan layanan telepon Kring Pajak 1500200 dan live chat di situs web www.pajak.go.id.

Selain keterlibatan dan kesadaran wajib pajak, serta peningkatan mutu layanan, peran Relawan Pajak untuk Negeri (Renjani) juga sangat vital. Dikutip dari laman landas <https://www.edukasi.pajak.go.id>, saat ini telah tercatat 7.595 relawan pajak dan 464 *Tax Center* sebagai mitra strategis DJP. Tak kenal lelah mereka mendampingi wajib pajak dengan memberikan konsultasi dan asistensi pengisian SPT Tahunan PPh. Dengan pola pikir dan sudut pandang kekinian, para Renjani, yang sebagian besar merupakan mahasiswa, selalu memberikan layanan dengan pendekatan yang relevan sesuai perkembangan zaman. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pun menyampaikan apresiasi kepada para Renjani.

Kinerja Kementerian Keuangan dalam mengelola #UangKita hingga 30 April 2024 ini juga terjaga dengan baik. Khususnya di sektor pendapatan negara, DJP membukukan Rp624,19 triliun, atau 31,38 persen dari target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024.

Momentum Kebangkitan Nasional

Kinerja yang terjaga dengan apik ini tak lepas dari momentum Hari Kebangkitan Nasional (Harkitnas), yang selalu kita peringati setiap 20 Mei. Saat itu, 20 Mei 1908, Boedi Oetomo sebagai organisasi pergerakan modern berskala nasional yang pertama, lahir.

Organisasi sosial nonpolitis ini menjadi tonggak, bahwa perjuangan nasionalisme tidak bisa dilakukan dengan cara kedaerahan. Gerakan nasional harus digalang demi tujuan bersama, yakni kemajuan di berbagai bidang, yakni sosial, ekonomi, dan budaya. Berdirinya organisasi yang dibidani oleh Dr. Soetomo ini ditetapkan sebagai Hari Kebangkitan Nasional melalui Keputusan Presiden Nomor 316/1959.

Momentum berharga ini tidak boleh kita sia-siakan. Dengan semangat kebangkitan nasional, di tengah situasi global yang belum stabil dan geopolitik yang masih memanas, mari kita tunjukkan bahwa Indonesia mampu bertahan menghadapi tantangan dengan elegan. Tentu saja, hal ini membutuhkan pengelolaan Uang Kita dengan sangat cermat.

Pengelolaan anggaran negara secara kredibel sangat membutuhkan integritas para penggawanya. Kementerian Keuangan (Kemenkeu) berhasil meraup indeks Survei Penilaian Integritas (SPI) 2023 sebesar 83,18. Angka tersebut merupakan yang tertinggi di antara Kementerian. Sementara itu, DJP meraih indeks SPI 2023 sebesar

81,53. Dengan indeks di atas 77,5, DJP bersama Kemenkeu berhasil mempertahankan predikat “Terjaga”, yang merupakan status tertinggi.

Mari kita manfaatkan momentum kebangkitan nasional dengan tetap menjaga integritas, demi mengelola uang kita secara tepercaya. Karena kita, sesuai dengan semboyan Kemenkeu, adalah pengawal uang negara. Kita adalah Nagara Dana Rakca.

Impor Barang Kiriman Hasil Perdagangan: Laporan Benar, Denda Terhindar

Pemerintah, melalui Bea Cukai, telah menerapkan skema self-assessment untuk importasi barang kiriman hasil perdagangan, berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 96/2023 tentang Ketentuan Kepabeanan, Cukai, dan Pajak atas Impor dan Ekspor Barang Kiriman. Dengan skema ini, importir dapat menyampaikan pemberitahuan data barang kiriman dan menghitung sendiri pungutan bea masuk dan pajak dalam rangka impor (PDRI).

Kepala Subdirektorat Humas dan Penyuluhan Bea Cukai, Encep Dudi Ginanjar mengatakan sebagai konsekuensi pemberlakuan self-assessment, importir dapat dikenai sanksi administrasi berupa denda, jika terdapat kesalahan pemberitahuan nilai pabean yang mengakibatkan kekurangan pembayaran bea masuk. "Jika lalai dalam memberitahukan nilai pabean yang menyebabkan kekurangan

pembayaran bea masuk, importir atau penerima barang dapat dikenai sanksi administrasi berupa denda," ujarnya.

Denda yang merupakan tagihan negara tersebut merupakan tanggung jawab importir/penerima barang. Karena, dalam proses bisnis barang kiriman, pengurusan penyelesaian kepabeanan, mulai dari pengajuan dokumen sampai dengan pembayaran, dilakukan oleh penyelenggara pos sebagai kuasa dari importir/penerima barang dan bertindak sebagai Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan (PPJK). Dalam hal barang kiriman melalui Penyelenggara Perdagangan melalui Sistem Elektronik (PPMSE), maka PPMSE bertindak sebagai importir dan bertanggung jawab atas pembayaran bea masuk dan PDRI, termasuk denda. Adapun Perusahaan Jasa Titipan (PJT) yang bertindak sebagai PPJK akan bertanggung jawab apabila importir tidak ditemukan.



Agar tidak terkena denda, menurut Encep importir perlu melaksanakan tiga hal. “Pertama, cermat. Informasikan kepada penjual atau pengirim barang untuk cermat dalam mengisi data sebenarnya atas barang kiriman saat pengiriman, terutama data nilai, uraian, dan jumlah barang. Kedua, proaktif. Rutin cek posisi barang kiriman ketika sudah sampai di Indonesia. Ketiga, recheck. Importir dapat mengonfirmasi kebenaran data nilai, uraian, dan jumlah barang kepada penyelenggara pos, sebelum penyelenggara pos mengirimkan dokumen perjanjian pengiriman barang (*consignment note/CN*) ke Bea Cukai,” rincinya.

Pengenaan denda ini, menurutnya bertujuan untuk memberikan keadilan bagi importir dan negara serta menciptakan persaingan yang sehat dengan industri dan UMKM dalam negeri. “Dengan adanya pengenaan denda diharapkan dapat memberantas praktik *under invoicing* atau pemberitahuan harga barang di bawah nilai transaksi,

yang menjadi modus pelanggaran dalam aktivitas impor barang kiriman hasil perdagangan,” ujarnya.

Praktik *under invoicing* diketahui telah menimbulkan potensi kerugian bagi penerimaan negara dan mengancam industri dalam negeri, karena barang impor bisa beredar dengan harga lebih murah. Murahannya harga barang disebabkan karena importir tidak membayar bea masuk dan pajak dalam rangka impor dengan semestinya.

Bea Cukai Bantu Evakuasi Korban Erupsi Gunung Ruan

Bea Cukai melalui Satuan Tugas (Satgas) Patroli Laut BC60002 milik Pangkalan Sarana Operasi (PSO) Bea Cukai Pantoloan bantu evakuasi korban terdampak letusan Gunung Ruang, pada Kamis (02/05).

Kepala PSO Bea Cukai Pantoloan, Minhajuddin Napsah, mengungkapkan bahwa proses evakuasi dimulai pada pukul 09.30 WITA di Dermaga Bahoyi, Kecamatan Tagulandang. Proses evakuasi dilakukan oleh kru Kapal BC60002 bersama anggota TNI AL Lantamal VIII Manado, Polsek Tagulandang, dan Basarnas Manado. Setelah proses evakuasi selesai, kapal tiba dan sandar di Pelabuhan Bitung pada pukul 15.45 WITA.

Jumlah pengungsi yang berhasil dievakuasi oleh tim ke kapal patroli Bea Cukai berjumlah 243 orang

yang terdiri dari 110 laki-laki dan 133 perempuan. “Rincian korban yang berhasil kami evakuasi terdiri dari 173 dewasa, 51 anak-anak, 14 lansia, 3 orang sakit, dan 2 ibu hamil,” ujar Minhajuddin.

Erupsi Gunung Ruang yang melanda Sulawesi Utara, pada Selasa (30/04) lalu berdampak serius bagi warga sekitar wilayah Sulawesi Utara dan Gorontalo. Dampak dari erupsi tersebut menghasilkan hujan abu hingga menyebabkan bandara yang berada di dua provinsi tersebut harus ditutup sementara. Selain itu, warga setempat harus menggunakan masker saat beraktivitas di luar ruangan dikarenakan abu vulkanik yang menyebar di jalanan membuat mata terasa pedas dan sesak napas.

“Kami berharap aksi kemanusiaan yang dilakukan



tim antarinstansi dapat memberikan perlindungan dan keselamatan bagi korban terdampak. Semoga bencana alam ini lekas mereda dan alam kembali pulih,” pungkas Minhajuddin.

Kementerian Keuangan dan IMF Gelar Conclusion Meeting Bahas Peningkatan *Tax Ratio* dan Implementasi Insentif Pajak

Kementerian Keuangan dan *International Monetary Fund* (IMF) menggelar *Conclusion Meeting - Technical Assistance Mission* IMF di Kantor Pusat Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa (07/05). Dipimpin oleh Dirjen Perbendaharaan Astera Primanto Bhakti, rapat dihadiri oleh perwakilan tim *Technical Assistance* IMF dan perwakilan dari direktorat dan unit di bawah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb), Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK), Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC), dan Badan Kebijakan Fiskal (BKF).

Dalam pembukaan rapat, Dirjen Perbendaharaan mengapresiasi asistensi teknis yang telah dilaksanakan antara IMF dan Kementerian Keuangan. Dirjen Perbendaharaan juga menyampaikan dua isu strategis untuk dimintakan asistensi dari IMF yaitu terkait peningkatan *tax ratio*

Indonesia dan perkembangan ekonomi yang memengaruhi penerimaan.

“Saya minta dua isu strategis dimintakan asistensi dari IMF yaitu terkait *tax ratio* Indonesia yang perlu ditingkatkan untuk membiayai belanja pemerintah serta bagaimana keberagaman perkembangan ekonomi di berbagai wilayah Indonesia memengaruhi penerimaan pusat dan daerah, serta terkait transfer perimbangan keuangan,” jelas Dirjen Perbendaharaan.

Rangkaian kegiatan yang telah diselenggarakan sejak Sabtu (23/4) tersebut membahas keterkaitan pajak regional dan nasional, serta implementasi insentif pajak. Hasil kajian yang dipaparkan oleh *Economist from the Tax Policy 2 Division* IMF Sebastian Beer membahas secara mendalam tentang kontribusi pajak regional di Indonesia. Pemerintahan yang akan datang memiliki target *tax ratio* yang ambisius 23 persen, yang



menjadi fokus IMF dalam mengkaji penerimaan pusat dan daerah serta distribusinya. Kajian yang dilakukan oleh IMF menyoroti tantangan identifikasi sumber asli penerimaan pajak di Indonesia karena struktur administrasi perpajakan yang ada, dengan tidak memasukkan transfer ke daerah sebagai variabel dalam analisisnya.

Dalam kajian tersebut, IMF menggunakan dua metode yaitu destination based dan origin based, untuk identifikasi sumber pajak yang berhasil meratakan distribusi pajak antar wilayah. Kontribusi neto dari setiap daerah cenderung sejalan dengan tingkat perkembangan ekonominya, namun tidak semua sektor ekonomi memberikan kontribusi yang sama terhadap penerimaan pemerintah. Terdapat rekomendasi untuk fokus pada evaluasi implementasi PPN, redesain skema insentif dan tarif PPh Badan, serta pendalaman kajian terkait penerapan pajak daerah dan sistem perimbangan keuangan. Dalam diskusi tersebut, DJP menyatakan minatnya untuk kajian lanjutan terutama pada

simplifikasi PPN dan restitusi pajak.

Pada forum tersebut, Kementerian Keuangan dan IMF sepakat untuk menjalin kerja sama dalam melakukan kajian dengan fokus pada evaluasi implementasi PPN, redesain skema pajak, serta pendalaman kajian terkait pajak daerah dan sistem perimbangan keuangan. DJP juga akan berkoordinasi dengan DJP terkait proses restitusi pajak, serta DJPK dan/atau DJPb akan berkoordinasi lebih lanjut dengan IMF untuk pendalaman kajian pada tema penerapan pajak daerah dan sistem perimbangan keuangan.

Indonesia Terpilih Menjadi Anggota GFS Advisory Committee IMF

Indonesia adalah salah satu negara yang berhasil menyusun dan mengadaptasi Manual Statistik Keuangan Pemerintah dari Manual Statistik Keuangan Pemerintah 2014 yang diterbitkan IMF. Selain menyusun Laporan Statistik Keuangan Pemerintah (LSKP) tingkat nasional yang menggambarkan konsolidasi Pemerintah secara nasional, Indonesia termasuk salah satu negara pertama yang menyusun LSKP tingkat wilayah yang menggambarkan konsolidasi Pemerintah di tingkat wilayah (provinsi). Hal ini sejalan dengan kebutuhan perhitungan PDB dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) serta kebutuhan *Financial Account Balance Sheet* (FABS) yang dilakukan oleh Bank Indonesia (BI).

Penerapan Statistik Keuangan Pemerintah Indonesia telah mendapat pengakuan dari dunia internasional, baik dari lembaga keuangan internasional seperti IMF, World Bank, maupun *Forum Data Gap Initiative* (DGI) G-20. Data Gap

Initiative adalah inisiatif yang dilakukan oleh G20 dengan melibatkan IMF dan *Financial Stability Board* (FSB) sebagai respon atas krisis keuangan yang terjadi pada tahun 2007–2008, melalui paket 20 rekomendasi penyempurnaan statistik ekonomi dan keuangan, yang diluncurkan dalam rangka meningkatkan ketersediaan dan keterbandingan data ekonomi dan keuangan untuk pengambilan kebijakan. G20 menyoroti kebutuhan pengambilan kebijakan dan pelaku pasar atas data keuangan yang akurat dan tepat waktu untuk dapat menyusun respon yang efektif serta mendukung analisis dan efektivitas surveillance.

Beberapa pencapaian Indonesia dalam implementasi Statistik Keuangan Pemerintah antara lain meliputi prestasi Indonesia yang dipilih sebagai salah satu negara yang masuk dalam kajian Neraca Statistik Keuangan Sektor Publik 2012–2016 yang dipresentasikan oleh IMF dalam Pertemuan Tahunan IMF-Bank Dunia 2018 di Bali. IMF juga melakukan endorsement ke negara lain terutama negara-negara di Asia



untuk benchmarking mengenai Statistik Keuangan Pemerintah Indonesia, misalnya Kamboja dan Bhutan. Selain itu, Reformasi Statistik Sektor Publik di Indonesia menjadi salah satu dari *featured case studies* pada *Getting Result in Macroeconomic Statistics: Featured Cases from 25 years of IMF Capacity Development in Statistics*. Progres Statistik Keuangan Pemerintah Indonesia juga di-*highlight* pada *Statistics Department at A Glance, 25th Anniversary IMF Statistics Department*, dan Indonesia menjadi salah satu negara G20 yang telah memenuhi target Rekomendasi *Data Gap Initiatives* (DGI) Nomor 15 mengenai Statistik Keuangan Pemerintah.

Government Finance Statistics Advisory Committee (GFSAC) adalah komite yang dibentuk untuk mendukung pengembangan kualitas, integritas metodologi dan analisis penggunaan data Statistik Keuangan Pemerintah, melalui forum pertukaran pengalaman dan pengetahuan mengenai metodologi dan mendorong penggunaan Statistik Keuangan Pemerintah untuk mendukung

pengambilan kebijakan fiskal. Salah satu kegiatan rutin GFSAC adalah *GFSAC Meeting*, yang membahas harmonisasi data Statistik Keuangan Pemerintah untuk meningkatkan transparansi kebijakan dan pemantauan data fiskal serta isu-isu statistik masa depan terkait sektor perekonomian.

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Kanwil DJPb) Provinsi DKI Jakarta, Mei Ling menghadiri pertemuan rutin GFSAC pada Rabu s.d. Kamis (24–25/04) di Washington DC, Amerika Serikat. Melalui pertemuan ini dibahas harmonisasi *Government Finance Statistics Manual* (GFSM atau Manual Statistik Keuangan Pemerintah) dengan *System of National Accounts* (SNA) dan *Balance of Payment Manual* (BoP), dua standar kompilasi statistik sektor riil dan sektor eksternal yang berlaku internasional. Harmonisasi ini diharapkan akan meningkatkan transparansi dan analisis kebijakan fiskal. Sejumlah isu menarik yang dibahas dalam pertemuan ini berkenaan penggunaan GFS untuk memperkuat analisis fiskal, penyelarasan dengan

standar akuntansi dan standar statistik lingkungan hidup untuk mengakomodasi perkembangan terkini seperti perubahan iklim, serta pembaruan klasifikasi belanja berdasarkan fungsi.

“Dalam GFSAC Meeting, Indonesia terus menyorotkan pentingnya harmonisasi antarstandar dalam rangka membangun konsistensi data dalam analisis dan pengambilan kebijakan. Indonesia juga terus mendorong peran signifikan negara-negara berkembang (*emerging countries*) dalam meningkatkan kualitas data statistik untuk pengambilan kebijakan,” jelas Kepala Kanwil DJPb Provinsi DKI Jakarta. Keikutsertaan dalam pertemuan ini karena Indonesia terpilih menjadi salah satu dari sepuluh anggota GFSAC yang mewakili seluruh negara anggota IMF, bersama sederetan negara maju seperti Inggris, Australia, Kanada, dan Belgia. Keterpilihan Indonesia menjadi bukti bahwa penerapan GFS Indonesia telah mendapatkan pengakuan dari dunia internasional. Salah satu pencapaian Indonesia yaitu keberhasilan dalam menyusun GFS berdasarkan standar internasional dalam rangka transparansi, analisis, dan evaluasi kebijakan fiskal serta dukungan terhadap penyusunan statistik nasional.

Green Sukuk sebagai Salah Satu Alternatif Instrumen Investasi Bertanggung Jawab

Saat ini, kita dihadapkan pada isu mendesak terkait lingkungan, seperti perubahan iklim, deforestasi, polusi, dan lainnya. Topik-topik ini telah menjadi bagian penting dalam diskusi global dan mendorong *awareness* masyarakat yang mulai beralih pada pilihan yang berkelanjutan dan ramah lingkungan. Perubahan ini tidak hanya terlihat dalam gaya hidup sehari-hari, seperti gerakan membawa tumbler, tas kain untuk belanja, atau peningkatan permintaan kendaraan listrik, namun juga merambah ke berbagai sektor lain, salah satunya sektor keuangan. Saat ini, banyak investor yang lebih tertarik pada instrumen yang tidak hanya menawarkan keuntungan finansial, namun juga memberikan manfaat dan yang sejalan dengan nilai-nilai keberlanjutan dan memberikan kontribusi positif

bagi bumi. Menurut data *United Nations Principles for Responsible Investment* (UNPRI), per 31 Maret 2023 jumlah *signatory* untuk *Responsible Investment* meningkat 10 persen (yoy), mencapai 5.391 penandatanganan yang terdiri atas 4.841 investor dan 550 penyedia jasa/penerbit.

Tren ini didukung oleh semakin banyak penelitian yang menyoroti manfaat jangka panjang dari praktik berkelanjutan. Berbagai hasil penelitian menunjukkan bahwa perusahaan dengan kredensial ESG yang kuat seringkali menunjukkan kinerja keuangan yang lebih baik dan profil risiko yang lebih rendah. Sejalan dengan hal tersebut, pemerintah dan institusi keuangan juga memainkan peran penting dalam mempromosikan investasi yang lebih bertanggung jawab (*responsible investment*). Terbaru, pada April 2024 the International



Capital Market Association (ICMA), the Islamic Development Bank (IsDB) dan the London Stock Exchange Group (LSEG) telah menerbitkan *Guidance on Green, Social and Sustainability Sukuk* yang bertujuan mendorong pertumbuhan pasar sukuk berkelanjutan dan memastikan pasar berkembang dengan memegang standar yang tinggi dan berintegritas.

Pemerintah Indonesia sendiri telah memperkenalkan berbagai inovasi investasi bertanggung jawab melalui instrumen Surat Berharga Negeranya, antara lain *Green Sukuk*, *SDG Bond*, dan *Blue Bond*. *Green Sukuk*, sebagai inovasi SBN yang pertama, menjadi pondasi dan pijakan baik bagi terbitnya obligasi hijau dari lembaga/institusi lainnya maupun bagi penerbitan instrumen SBN Pemerintah yang serupa.

Green Sukuk adalah obligasi syariah yang digunakan untuk membiayai proyek-proyek yang berdampak positif terhadap lingkungan, seperti energi terbarukan, efisiensi energi, pengelolaan limbah, dan proyek infrastruktur hijau lainnya. Sampai dengan saat

ini, total penerbitan *Green Sukuk* oleh pemerintah Indonesia di pasar internasional (*Global Green Sukuk*) telah mencapai USD6 miliar. Sementara, di pasar domestik telah mencapai Rp56,8 triliun yang terdiri dari *Green Sukuk Ritel* senilai Rp30,7 triliun dan *Project Based Green Sukuk* senilai Rp26,1 triliun.

Di 2024 ini, penerbitan *Green Sukuk* pertama dilakukan melalui seri Sukuk Tabungan ST012T4 (Tenor 4 Tahun) yang saat ini sedang dibuka masa penawarannya hingga 29 Mei 2024. Bersamaan dengan penerbitan ST012T4 tersebut, pemerintah juga menerbitkan seri ST012T2 (Tenor 2 Tahun). Kedua seri tersebut ditawarkan dengan tingkat imbalan/kupon mengambang (*floating with floor*), 6,55 persen per tahun untuk ST012T4 dan 6,40 persen per tahun untuk ST012T2.

Green Sukuk merupakan inovasi keuangan yang tidak hanya mematuhi prinsip-prinsip syariah tetapi juga mendukung keberlanjutan lingkungan. Dengan tantangan perubahan iklim yang semakin mendesak, instrumen seperti *Green Sukuk* menjadi semakin relevan

dan penting. Dukungan dari pemerintah, peningkatan kesadaran investor, dan keberhasilan negara-negara pionir seperti Indonesia menunjukkan bahwa *Green Sukuk* memiliki potensi besar untuk tumbuh dan berkontribusi pada masa depan yang lebih hijau dan berkelanjutan. Bagi para investor dan pemangku kepentingan, *Green Sukuk* menawarkan kesempatan untuk berinvestasi secara bertanggung jawab dan mendukung proyek-proyek yang berkontribusi positif terhadap lingkungan. Dengan demikian, *Green Sukuk* tidak hanya menjadi alat investasi, tetapi juga instrumen perubahan yang mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan di seluruh dunia.

Halaman Ini Dikосongkan

